

RENCANA KERJA TAHUN 2023



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

2023

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan untuk periode satu tahun baik yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan cara mendorong partisipasi masyarakat (Lampiran 6 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010). Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur berkewajiban menyusun Renja 2023 sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pemerintah provinsi dan nasional. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, berperan penting dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur.

Penyusunan Renja 2023 terdiri atas beberapa tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. *Tahap pertama* adalah tahap persiapan rancangan Renja yang terdiri atas pengumpulan dan pengolahan data dan informasi untuk analisis gambaran pelayanan SKPD. Pada tahap ini dilakukan juga penelaahan/review hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Berdasarkan isu-isu penting tersebut dan setelah mempertimbangkan hasil penelaahan RKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan usulan kegiatan masyarakat, dirumuskan tujuan dan sasaran yang kemudian menjadi bahan atau rumusan kegiatan prioritas. *Tahap kedua* adalah tahap penyempurnaan rancangan Renja yang terdiri atas sinkronisasi Rancangan Renja dengan kebijakan Nasional dan Provinsi dan penyesuaian Rancangan Renja dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa sampai provinsi.

Dokumen Renja 2023 merupakan penjabaran dari kebijakan dan strategi pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari program pembangunan sektor industri dan perdagangan tahun sebelumnya. Renja 2023 adalah

penerjemahan visi, misi, program dan kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Disperindag Jawa Timur 2019-2024 dalam kurun waktu tahun 2023.

Dokumen ini merupakan produk dari tahap pertama penyusunan Renja, yaitu yakni tahap Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja 2023 ini antara lain :

1. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 102);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 98 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 102 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

- a. Pedoman dan dasar penyusunan program dan kegiatan tahun 2023.
- b. Acuan dalam rangka penyusunan program dan kegiatan tahun 2023.

1.3.2. Tujuan

- a. Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, dan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2019-2024, dalam bentuk program, kegiatan, dan anggaran indikatif.
- b. Menyelaraskan program kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 dengan program nasional di bidang perindustrian dan perdagangan, program kabupaten/kota, isu-isu strategis, usulan-usulan pada forum Musrenbang yang dilakukan secara berjenjang, serta saran masukan dari berbagai pemangku kepentingan di bidang perindustrian dan perdagangan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renja 2023 disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Bab ini memuat :

1.1 Latar belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat :

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Dan yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas

tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD;

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan

4. Tabel T-C.31:

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

3. Tabel T-C.32

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat :

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain

meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33,

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB 2

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur tahun 2021 didasarkan dan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Timur Tahun 2019-2024, Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2021 dan pencapaian Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur sampai dengan tahun tahun 2021 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tujuan :

1. Meningkatnya Nilai Tambah Produksi
2. Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021

TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya Nilai Tambah Produksi	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)	3,18	3,36	-
Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan	Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi (%)	0,14	7,83	-

Sasaran Startegis :

1. Meningkatnya PDRB sektor industri pengolahan
2. Meningkatnya net-ekspor perdagangan dalam negeri
3. Meningkatnya net-ekspor perdagangan luar negeri
4. Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya PDRB sektor industri pengolahan	Nilai PDRB industri pengolahan (Rp. Triliun)	700	705,79	
Meningkatnya net-ekspor perdagangan dalam negeri	pertumbuhan net ekspor antar daerah (%)	7	82,92	-
Meningkatnya net-ekspor perdagangan luar negeri	pertumbuhan net ekspor non migas (%)	2	- 105,85	-
Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	peningkatan barang yang diawasi dan sertifikasi barang beredar (%)	1	5,30	-
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	86,20		

Pada Tahun 2021 kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang telah dicapai berdasarkan masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatnya Nilai Tambah Produksi, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan pada tahun 2021 dengan target Rp. 3,18 persen dan realisasi sebesar Rp. 3,36 persen. Hal ini dikarenakan oleh pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan mengalami peningkatan seiring dengan beberapa kebijakan terkait pemulihan ekonomi nasional khususnya di sektor industri. Beberapa sub sektor industri pengolahan tercatat mampu menunjukkan peningkatan seperti Industri makanan dan minuman dan Industri kimia, farmasi dan obat

tradisional yang tetap tumbuh positif karena ditopang naiknya hasil produksi pertanian dan upaya masyarakat dalam peningkatan kualitas kesehatan.

Tujuan 2 : Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi pada tahun 2021 dengan target sebesar 0,14 persen dan terealisasi sebesar 7,83 persen. Tingginya Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi mulai terbukanya kegiatan perdagangan pada semester II tahun 2021 seiring melandainya pandemi covid 19 di indonesia.

Tabel 2.1 Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah (TC 29) tahun 2019-2021

● 2019

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program RENSTRA Tahun (2014-2019) dan (2019-2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Realisasi RENJA PD Tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Tahun 2019	% Tingkat Capaian RENSTRA Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 07 0100 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/aparaturnya terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor	100	100					100	100,00
2 07 0100 01 019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	95	95					95	100,00
2 07 0100 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100	100					100	100,00
2 07 0100 02 012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia (paket)	5	20					20	400,00
2 07 0100 02 031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara (paket)	7	20					20	285,71
2 07 0100 07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	100	100					100	100,00
2 07 0100 07 002	Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal	22	25					25	113,64
2 07 0100 08	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100	100					100	100,00
2 07 0100 08 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (dokumen)	6	5					5	83,33
2 07 0100 08 002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun (dokumen)	6	6					6	100,00
2 07 0100 08 003	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Jumlah update database perangkat daerah (paket)	3	3					3	100,00
2 07 0100 08 004	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun ; Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun	12	1					1	8,33
2 07 0100 31	Program Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri	Jumlah jasa pelayanan teknis	1.572	1.572					1572	100,00
2 07 0100 31 019	Revitalisasi Unit Pelaksana Teknis	Terlaksananya pembangunan fisik, peningkatan peralatan pelayanan dan profil UPT (paket)	13	10					10	76,92
2 07 0100 31 020	Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPT Aneka Industri dan Kerajinan	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran UPT Aneka Industri dan Kerajinan (%)	82	82					82	100,00
2 07 0100 31 021	Pelayanan Teknis pada UPT Aneka Industri dan Kerajinan	Jumlah jasa pelayanan UPT Aneka Industri dan Kerajinan (jasa)	780	780					780	100,00
2 07 0100 31 022	Pembinaan industri pada UPT Aneka Industri dan Kerajinan	Jumlah industri yang mendapatkan pembinaan (pelaku industri)	110	35					35	31,82
2 07 0100 31 023	Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPTI Kayu dan Produk Kayu	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran UPTI Kayu Pasuruan (%)	82	82					82	100,00
2 07 0100 31 024	Pelayanan Teknis pada UPTI Kayu dan Produk Kayu	Jumlah jasa pelayanan UPTI Kayu Pasuruan (jasa)	780	780					780	100,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program RENSTRA Tahun (2014-2019) dan (2019-2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Realisasi RENJA PD Tahun 2019			
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Tahun 2019	% Tingkat Capaian RENSTRA Tahun 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2	07	0100	31	026	Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPTI Kulit dan Produk Kulit	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran UPTI Kulit Magetan (%)	82	92			92	112,20
2	07	0100	31	027	Pelayanan Teknis pada UPTI Kulit dan Produk Kulit	Jumlah jasa pelayanan UPTI Kulit Magetan (jasa)	624	1.190			1190	190,71
2	07	0100	31	029	Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPTI Logam dan Perakayasaan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPTI Logam dan Perakayasaan Sidoarjo (%)	82	82			82	100,00
2	07	0100	31	030	Pelayanan Teknis pada UPTI Logam dan Perakayasaan	Jumlah Jasa Pelayanan UPTI Logam dan Perakayasaan Sidoarjo (jasa)	416	416			416	100,00
2	07	0100	31	032	Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPTI Makanan, Minuman, dan Kemasan	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran UPTI Mamin dan Kemasan (%)	82	82			82	100,00
2	07	0100	31	033	Pelayanan Teknis pada UPTI Makanan, Minuman, dan Kemasan	Jumlah jasa pelayanan UPTI Mamin dan Kemasan (jasa)	780	870			870	111,54
2	07	0100	31	034	Pembinaan industri pada UPTI Makanan, Minuman, dan Kemasan	Jumlah industri yang mendapatkan pembinaan (pelaku industri)	110	140			140	127,27
2	07	0100	31	035	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi IKM Pada UPTI Kayu dan Produk Kayu	Jumlah industri yang mendapatkan pembinaan (pelaku industri)	110	125			125	113,64
2	07	0100	31	036	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi IKM Pada UPTI Kulit dan Produk Kulit	Jumlah industri yang mendapatkan pembinaan (pelaku industri)	110	180			180	163,64
2	07	0100	31	037	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi IKM Pada UPTI Logam dan Perakayasaan	Jumlah industri yang mendapatkan pembinaan (pelaku industri)	110	240			240	218,18
2	07	0100	33		Program Peningkatan Standarisasi Industri	Persentase IKM yang telah menerapkan standarisasi dan HKI(%)	9	8			8,25	91,67
2	07	0100	33	021	Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Surabaya	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran PMPI dan TK Surabaya	82	82			82	100,00
2	07	0100	33	024	Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Malang	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran PMPI dan TK Malang	82	82			82	100,00
2	07	0100	33	027	Pembinaan dan Pelatihan Mutu Produk Industri & Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual pada UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Surabaya	Jumlah Industri yang mendapatkan fasilitas (pelaku industri)	820	600			600	73,17
2	07	0100	33	028	Pembinaan dan Pelatihan Desain Produk Industri dan Teknologi Kreatif pada UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Surabaya	Jumlah industri yang mendapatkan fasilitas (pelaku industri)	540	295			295	54,63
2	07	0100	33	029	Pembinaan dan Pelatihan Mutu Produk Industri & Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual pada UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Malang	Jumlah Industri yang mendapatkan fasilitas	425	733			733	172,47
2	07	0100	33	030	Pembinaan dan Pelatihan Desain Produk Industri dan Teknologi Kreatif pada UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Malang	Jumlah industri yang mendapatkan fasilitas	286	270			270	94,41
2	07	0100	41		Program Pengembangan Industri Agro	PDRB industri agro (Rp. Trilyun)	332	326			325,644	98,09

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program RENSTRA Tahun (2014-2019) dan (2019-2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Realisasi RENJA PD Tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Tahun 2019	% Tingkat Capaian RENSTRA Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 07 0100 41 003	Pembinaan Pelaku Industri di Kawasan Agropolitan	Jumlah Pelaku Industri yang difasilitasi	323	140					140	43,34
2 07 0100 41 004	Pemetaan industri hasil tembakau	Jumlah Dokumen yang disusun (dokumen)	1	1					1	100,00
2 07 0100 41 005	Pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok sigaret dan pemberian sertifikat/kode registrasi mesin pelinting rokok sigaret	Jumlah sertifikat/registrasi yang di terbitkan (sertifikat)	120	52					52	43,33
2 07 0100 41 006	Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat	Jumlah Orang yang difasilitasi	433	390					390	90,07
2 07 0100 41 007	Pembinaan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan	Jumlah Pelaku Industri yang difasilitasi	883	280					280	31,71
2 07 0100 41 008	Anti-Poverty Program (APP) Bidang Industri Agro	Jumlah Kelompok yang difasilitasi (kelompok masyarakat)	83	4					4	4,82
2 07 0100 41 009	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar	Jumlah Pelaku Industri yang difasilitasi (pelaku industri)	317	363					363	114,51
2 07 0100 41 010	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Industri Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	Jumlah Pelaku Industri yang difasilitasi (pelaku industri)	535	295					295	55,14
2 07 0100 42	Program Pengembangan Industri Non-Agro	PDRB industri non agro (Rp. Trilyun)	214	210					209,822	98,05
2 07 0100 42 001	Pembinaan Industri Logam, Mesin dan Alat Transportasi	Jumlah Pelaku Industri yang difasilitasi ;	689	280					280	40,64
2 07 0100 42 003	Anti-Poverty Program (APP) Bidang Industri non-Agro	Jumlah Pelaku Industri yang difasilitasi (pelaku industri)	83	100					100	120,48
2 07 0100 42 006	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Industri Kimia, Tekstil dan Aneka	Jumlah Pelaku Industri yang difasilitasi (pelaku industri)	593	244					244	41,15
2 07 0100 42 007	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Industri Elektronika dan Telematika	Jumlah Pelaku Industri yang difasilitasi (pelaku industri)	250	255					255	102,00
2 07 0100 43	Program Penataan Struktur Industri dan Pengembangan Perdagangan	Jumlah Rancangan Kebijakan yang disusun (kebijakan)	16	16					16	100,00
2 07 0100 43 001	Penataan Struktur Industri	Luas kawasan industri yang terpakai (Ha)	2.223	2.223					2223	100,00
2 07 0100 43 002	Penyusunan Rancangan Kebijakan Pengembangan Industri	Jumlah Rancangan Kebijakan yang disusun (kebijakan)	2	3					3	150,00
2 07 0100 43 003	Penyelenggaraan Kerjasama Lintas Sektor dan Lintas Wilayah untuk Pengembangan Industri dan Perdagangan	Jumlah Kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah yang difasilitasi (kerjasama)	10	10					10	100,00
2 07 0100 43 005	Penyusunan Sistem Pendataan Industri dan Perdagangan	Jumlah Data yang disusun (dokumen)	2	2					2	100,00
2 07 0100 43 006	Penyusunan Rancangan Kebijakan Pengembangan Perdagangan	Jumlah Rancangan Kebijakan yang disusun (kebijakan)	2	2					2	100,00
2 06 0100 15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah Barang yang diawasi (unit)	796	780					780	97,99
2 06 0100 15 052	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Surabaya	Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Surabaya	82	82					82	100,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program RENSTRA Tahun (2014-2019) dan (2019-2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Realisasi RENJA PD Tahun 2019				
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Tahun 2019	% Tingkat Capaian RENSTRA Tahun 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2	06	0100	15	053	Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Surabaya	Jumlah barang yang diawasi (unit)	156	900				900	576,92
2	06	0100	15	054	Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha di Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Surabaya	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang mendapat pembinaan perlindungan konsumen (orang)	200	250				250	125,00
2	06	0100	15	055	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Malang	Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Malang	82	82				82	100,00
2	06	0100	15	056	Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Malang	Jumlah barang yang diawasi (unit)	156	165				165	105,77
2	06	0100	15	057	Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha di Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Malang	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang mendapat pembinaan perlindungan konsumen (orang)	200	200				200	100,00
2	06	0100	15	058	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Jember	Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Jember (%)	82	82				82	100,00
2	06	0100	15	059	Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Jember	Jumlah barang yang diawasi (unit)	156	160				160	102,56
2	06	0100	15	060	Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha di Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Jember	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang mendapat pembinaan perlindungan konsumen (orang)	200	450				450	225,00
2	06	0100	15	061	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Bojonegoro	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Bojonegoro (%)	82	82				82	100,00
2	06	0100	15	062	Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Bojonegoro	Jumlah barang yang diawasi (unit)	156	450				450	288,46
2	06	0100	15	063	Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha di Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Bojonegoro	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang mendapat pembinaan perlindungan konsumen (orang)	200	200				200	100,00
2	06	0100	15	064	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Kediri	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Kediri (%)	82	82				82	100,00
2	06	0100	15	065	Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Kediri	Jumlah barang yang diawasi (unit)	156	251				251	160,90
2	06	0100	15	066	Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha di Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Kediri	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang mendapat pembinaan perlindungan konsumen (orang)	200	270				270	135,00
2	06	0100	18		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Net ekspor perdagangan dalam negeri (Rp. Trilyun)	130	130				130	100,00
2	06	0100	18	008	Stabilisasi harga dan distribusi kebutuhan pokok serta penyediaan informasi pasar	Jumlah pasar sasaran pengendalian harga dan distribusi (pasar)	121	116				116	95,87
2	06	0100	18	039	Pelaksanaan Sistem Resi Gudang	Jumlah Produsen dan Konsumen yang mendapatkan fasilitasi tata niaga perdagangan (org)	2	2				2	100,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program RENSTRA Tahun (2014-2019) dan (2019-2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Realisasi RENJA PD Tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Tahun 2019	% Tingkat Capaian RENSTRA Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 06 0100 18 043	Penguatan Kantor Perwakilan Dagang (KPD)	Jumlah kerjasama dagang yang difasilitasi KPD & misi dagang (kerjasama)	235	231					231	98,30
2 06 0100 18 045	Pembinaan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi (unit)	116	41					41	35,34
2 06 0100 18 046	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran	Jumlah Barang yang diawasi (unit)	780	765					765	98,08
2 06 0100 18 047	Pembinaan Tertib Niaga bagi Konsumen dan Produsen	Jumlah produsen dan Konsumen yang mendapatkan fasilitas tata niaga perdagangan (org)	208	100					100	48,08
2 06 0100 18 048	Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat Melalui Promosi Dalam Negeri	Jumlah pengusaha yang mendapatkan fasilitas promosi (unit usaha)	208	60					60	28,85
2 06 0100 22	Program Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor	Net-ekspor nonmigas (milyar US \$)	6	6					6,44	107,33
2 06 0100 22 001	Intensifikasi pelayanan ekspor	Jumlah SKA yang diterbitkan (SKA)	150.858	158.858					158858	105,30
2 06 0100 22 002	Pengendalian dan pengawasan produk-produk impor	Jumlah importir yang diawasi (importir)	20	25					25	125,00
2 06 0100 22 003	Penyelenggaraan Promosi dan Kerjasama Perdagangan Internasional	Jumlah IKM/pengusaha yang mendapatkan fasilitas promosi internasional (unit usaha)	85	40					40	47,06
2 06 0100 31	Program Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Jumlah Sertifikasi yang dikeluarkan (sertifikat)	23.336	7.933					7933	33,99
2 06 0100 31 004	Penyediaan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian di UPT PSMB-LT Surabaya	Jumlah ruang lingkup sertifikasi (komoditi/besaran)	2	2					2	100,00
2 06 0100 31 011	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT PSMB-LT Surabaya	Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (%)	82	82					82	100,00
2 06 0100 31 012	Pelayanan Jaminan Mutu di UPT PSMB-LT Surabaya	Jumlah sertifikat jaminan mutu yang diterbitkan dan diawasi (sertifikat)	246	126					126	51,22
2 06 0100 31 013	Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi di UPT PSMB-LT Surabaya	Jumlah pengujian dan kalibrasi yang dilakukan (sertifikat)	16.627	4.088					4088	24,59
2 06 0100 31 014	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT PSMB-LT Jember	Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (%)	82	82					82	100,00
2 06 0100 31 015	Pelayanan Jaminan Mutu di UPT PSMB-LT Jember	Jumlah sertifikat jaminan mutu yang diterbitkan dan diawasi (sertifikat)	105	55					55	52,38
2 06 0100 31 016	Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi di UPT PSMB-LT Jember	Jumlah pengujian dan kalibrasi (sertifikat)	10.919	3.590					3590	32,88
2 06 0100 31 017	Penumbuhan dan penguatan kelembagaan di UPT BPSMB LT Jember	Jumlah peserta yang mendapatkan Standardisasi Kualitas Bahan Baku (peserta)	749	759					759	101,34
2 06 0100 31 018	Penumbuhan dan penguatan kelembagaan di UPT BPSMB LT Surabaya	Jumlah Peserta yang mendapatkan Standardisasi Kualitas Bahan Baku (peserta)	624	50					50	8,01
2 06 0100 31 019	Penerapan Inovasi Teknis di UPT PSMB-LT Surabaya	Jumlah Ruang Lingkup Sertifikasi (komoditi/besaran)	2	2					2	100,00
2 06 0100 31 020	Penerapan Inovasi Teknis di UPT PSMB-LT Jember	Jumlah Ruang Lingkup Sertifikasi (komoditi/besaran)	2	2					2	100,00

• 2020

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program RENSTRA Tahun (2014-2019) dan (2019-2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Realisasi RENJA PD Tahun 2020				
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Tahun 2020	% Tingkat Capaian RENSTRA Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2	7	100	1		Program Pelayanan Kesekretariatan	- Persentase indikator program yang tercapai	80	88,5				88,5	110,63
						- Persentase realisasi anggaran	88,5	97,23				97,23	109,86
						- Indeks profesionalitas ASN	88,5	51,78				51,78	58,51
2	7	100	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah	78	8				8	10,26
2	7	100	1	2	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	78	13				13	16,67
2	7	100	1	3	Ketatausahaan dan Kepegawaian	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	48	13				13	27,08
2	7	100	15		Program Pengembangan Industri Agro	Nilai produksi industri agro (Trilyun Rupiah)	207	191,64				191,64	92,7
2	7	100	15	1	Pengembangan Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar	Jumlah pelaku industri minuman hasil tembakau dan bahan penyegar yang difasilitasi (pelaku industri)	4.030	15				15	0,37
2	7	100	15	2	Pengembangan Industri Hasil Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan	Jumlah pelaku industri hasil pertanian, kehutanan dan perkebunan yang difasilitasi (pelaku industri)	4.030	10				10	0,25
2	7	100	15	3	Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	Jumlah pelaku industri makanan, hasil laut dan perikanan yang difasilitasi (pelaku industri)	4.030	30				30	0,74
2	7	100	15	4	Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat	Jumlah masyarakat yang difasilitasi (masyarakat)	3.345	65				65	1,94
2	7	100	15	5	Pemetaan Industri Hasil Tembakau	Jumlah dokumen yang disusun	6	1				1	16,67
2	7	100	15	6	Pendataan dan Pengawasan Kepemilikan atau Penggunaan Mesin Pelinting Rokok Sigaret dan Pemberian Sertifikat/Kode Registrasi Mesin Pelinting Rokok Sigaret	Jumlah sertifikat/registrasi yang diterbitkan (dokumen)	6	13				13	216,67
2	7	100	15	7	Anti-Poverty Program (APP) Bidang Industri Agro	Jumlah kelompok masyarakat yang difasilitasi	25	1				1	4
2	7	100	15	8	Pembinaan Pelaku Industri di Kawasan Agropolitan	Jumlah pelaku industri yang difasilitasi	1.360	60				60	4,41
2	7	100	16		Program Pengembangan Industri Non Agro	Nilai produksi industri non agro (Trilyun Rupiah)	30	27,601				27,601	91,06
2	7	100	16	1	Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Alat Transportasi	Jumlah pelaku industri logam, mesin dan alat transportasi yang difasilitasi (pelaku industri)	4.715	4				4	0,08
2	7	100	16	2	Pengembangan Industri Kimia, Tekstil dan Aneka	Jumlah pelaku industri kimia, tekstil dan aneka yang difasilitasi (pelaku industri)	4.715	22				22	0,47
2	7	100	16	3	Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika	Jumlah pelaku industri elektronika dan telematika yang difasilitasi (pelaku industri)	4.715	90				90	1,91
2	7	100	16	4	Anti-Poverty Program (APP) Bidang Industri non Agro	Jumlah kelompok masyarakat yang difasilitasi	32	0				0	0
2	7	100	17		Program Pengembangan Industri dan Perdagangan	Jumlah rumusan rancangan kebijakan (dokumen)	10	10				10	100

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program RENSTRA Tahun (2014-2019) dan (2019-2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Realisasi RENJA PD Tahun 2020		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Tahun 2020	% Tingkat Capaian RENSTRA Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	7	100	17	1	Penyusunan Rancangan kebijakan Pengembangan Industri	Jumlah bahan rumusan rancangan kebijakan pengembangan industri (dokumen)	5	4		4	80
2	7	100	17	2	Penyusunan Rancangan Kebijakan Pengembangan Perdagangan	Jumlah bahan rumusan rancangan kebijakan pengembangan perdagangan (dokumen)	5	4		4	80
2	7	100	17	3	Penyusunan Data dan Sistem Informasi Industri dan Perdagangan	Jumlah data industri dan perdagangan (dokumen)	4	4		4	100
2	7	100	18		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Industri Kayu dan Produk Kayu	Persentase peningkatan pelayanan teknis industri kayu dan produk kayu	2	4,540967423		4,540967423	227,05
2	7	100	18	1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran pada UPTI Kayu dan Produk Kayu	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran UPTI Kayu Pasuruan	80	80		80	100
2	7	100	18	2	Pelayanan Teknis Industri Kayu dan Produk Kayu	Jumlah jasa pelayanan UPTI Kayu Pasuruan	4.960	2118		2118	42,7
2	7	100	18	3	Pengembangan Teknis Industri Kayu dan Produk Kayu	Jumlah industri yang mendapatkan Pengembangan Teknis Industri Kayu dan Produk Kayu	3.404	223		223	6,55
2	7	100	19		Program Peningkatan Pelayanan Teknis pada UPTI Kulit dan Produk Kulit	Persentase peningkatan pelayanan jasa teknis industri kulit dan produk kulit	2	11,28712871		11,28712871	564,36
2	7	100	19	1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran pada UPTI Kulit dan Produk Kulit	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran UPTI Kulit Magetan	80	80		80	100
2	7	100	19	2	Pelayanan Teknis Industri Kulit dan Produk Kulit	Jumlah jasa pelayanan UPTI Kulit Magetan	4.960	1406		1406	28,35
2	7	100	19	3	Pengembangan Teknis Industri Kulit dan Produk Kulit	Jumlah industri yang mendapatkan Pengembangan Teknis Industri Kulit dan Produk Kulit	3.404	200		200	5,88
2	7	100	20		Program Peningkatan Pelayanan Teknis pada UPTI Logam dan Perekayasaan	Persentase peningkatan pelayanan jasa teknis industri logam dan perekayasaan	2	-34,28239396		-34,28239396	-1714,12
2	7	100	20	1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran pada UPTI Logam dan Perekayasaan	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran UPTI Logam dan Perekayasaan Sidoarjo	80	80		80	100
2	7	100	20	2	Pelayanan Teknis Industri Logam dan Perekayasaan	Jumlah jasa pelayanan UPTI Logam dan Perekayasaan	4.960	591		591	11,92
2	7	100	20	3	Pengembangan Teknis Industri Logam dan Perekayasaan	Jumlah industri yang mendapatkan Pengembangan Teknis Industri Logam dan Perekayasaan	3.404	220		220	6,46
2	7	100	21		Program Peningkatan Pelayanan Teknis pada UPTI Makanan Minuman dan Kemasan	Persentase peningkatan pelayanan jasa teknis industri makanan minuman dan kemasan	2	82,78688525		82,78688525	4139,34
2	7	100	21	1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran pada UPTI Makanan Minuman dan Kemasan	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran UPTI Makanan Minuman dan Kemasan	80	80		80	100
2	7	100	21	2	Pelayanan Teknis Industri Makanan Minuman dan Kemasan	Jumlah jasa pelayanan UPTI Makanan Minuman dan Kemasan	2.980	1075		1075	36,07
2	7	100	21	3	Pengembangan Teknis Industri Makanan Minuman dan Kemasan	Jumlah industri yang mendapatkan Pengembangan Teknis Industri Makanan Minuman dan Kemasan	3.405	10		10	0,29
2	7	100	22		Program Pembinaan Pelayanan Teknis pada UPTI Aneka Industri dan Kerajinan	Persentase peningkatan pelayanan jasa teknis industri di UPTI Aneka Industri dan Kerajinan	2	-12,5		-12,5	-625

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program RENSTRA Tahun (2014-2019) dan (2019-2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Realisasi RENJA PD Tahun 2020	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Tahun 2020	% Tingkat Capaian RENSTRA Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 7 100 22 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran pada UPTI Aneka Industri dan Kerajinan	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran UPT Aneka Industri dan Kerajinan	80	82					82	102,5
2 7 100 22 2	Pelayanan Teknis Aneka Industri dan Kerajinan	Jumlah jasa pelayanan UPT Aneka Industri dan Kerajinan	2.980	452					452	15,17
2 7 100 22 3	Pengembangan Teknis Aneka Industri dan Kerajinan	Jumlah industri yang mendapatkan Pengembangan Teknis Aneka Industri dan Kerajinan	3.405	0					0	0
2 7 100 23	Program Pembinaan Standarisasi dan Desain Produk Industri pada UPT PMPI dan TK Surabaya	Persentase peningkatan pelayanan jasa teknis industri di UPT PMPI dan TK Surabaya	2	-15,82222222					-15,82222222	-791,11
2 7 100 23 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran pada UPT PMPI dan TK Surabaya	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran di UPT PMPI dan TK Surabaya	80	80					80	100
2 7 100 23 2	Pembinaan Mutu Produk Industri dan Kekayaan Intelektual di Wilayah kerja UPT PMPI dan TK Surabaya	Jumlah jasa pelayanan Mutu Produk Industri dan Kekayaan Intelektual	5.973	142					142	2,38
2 7 100 23 3	Pembinaan dan Pelatihan Desain Produk Industri dan Teknologi Kreatif di Wilayah kerja UPT PMPI dan TK Surabaya	Jumlah jasa pelayanan Desain Produk Industri dan Teknologi Kreatif	3.280	336					336	10,24
2 7 100 24	Program Pembinaan Standarisasi dan Desain Produk Industri pada UPT PMPI dan TK Malang	Persentase peningkatan pelayanan jasa teknis industri di UPT PMPI dan TK Malang	2	-15,82222222					-15,82222222	-791,11
2 7 100 24 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran pada UPT PMPI dan TK Malang	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran di UPT PMPI dan TK Malang	80	80					80	100
2 7 100 24 2	Pembinaan Mutu Produk Industri dan Kekayaan Intelektual di Wilayah kerja UPT PMPI dan TK Malang	Jumlah jasa pelayanan Mutu Produk Industri dan Kekayaan Intelektual	5.360	76					76	1,42
2 7 100 24 3	Pembinaan dan Pelatihan Desain Produk Industri dan Teknologi Kreatif di Wilayah kerja UPT PMPI dan TK Malang	Jumlah jasa pelayanan Desain Produk Industri dan Teknologi Kreatif	3.630	489					489	13,47
2 6 100 15	Program Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor	Net Ekspor Non Migas (Milyar US\$)	3	1,46					1,46	46,2
2 6 100 15 1	Intensifikasi pelayanan ekspor	Jumlah SKA yang diterbitkan	1.007.500	105812					105812	10,5
2 6 100 15 2	Pengendalian dan pengawasan produk-produk impor	Jumlah importir yang diawasi	1.040	18					18	1,73
2 6 100 15 3	Penyelenggaraan Promosi dan Kerjasama Perdagangan Internasional	Jumlah IKM/pengusaha yang mendapatkan fasilitas promosi internasional (pelaku usaha)	1.040	2					2	0,19
2 6 100 16	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Net ekspor perdagangan dalam negeri (Trilyun Rupiah)	221	120,03					120,03	54,31
2 6 100 16 1	Stabilisasi barang pokok dan distribusi kebutuhan pokok serta penyediaan informasi pasar	Jumlah pasar sasaran pengendalian harga dan distribusi (pasar)	116	116					116	100
2 6 100 16 2	Fasilitasi Promosi bagi usaha mandiri masyarakat melalui penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Jumlah pengusaha yang mendapatkan fasilitas promosi dalam negeri (pelaku usaha)	1.640	218					218	13,29
2 6 100 16 3	Pembinaan unit usaha perdagangan, distribusi dan logistik	Jumlah Produsen dan Konsumen yang mendapatkan fasilitas tata niaga perdagangan (orang)	8.200	388					388	4,73

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program RENSTRA Tahun (2014-2019) dan (2019-2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Realisasi RENJA PD Tahun 2020	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Tahun 2020	% Tingkat Capaian RENSTRA Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 6 100 16 4	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran	Jumlah dokumen informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran yang disusun	6	1					1	16,67
2 6 100 17	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan (wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Surabaya)	Persentase jumlah temuan dalam pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga	10	2,951179994					2,951179994	29,51
2 6 100 17 1	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Surabaya	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran UPT PK Surabaya	80	80					80	100
2 6 100 17 2	Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga (Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Surabaya)	Jumlah barang beredar, jasa dan tertib niaga yang diawasi (unit)	219.800	230213					230213	104,74
2 6 100 17 3	Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha (Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Surabaya)	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang mendapat pembinaan perlindungan konsumen (orang)	3.140	735					735	23,41
2 6 100 18	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan (wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Malang)	Persentase Jumlah temuan dalam pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga	10	21,26549541					21,26549541	212,65
2 6 100 18 1	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Malang	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran UPT PK Malang	80	80					80	100
2 6 100 18 2	Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga (Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Malang)	Jumlah barang beredar, jasa dan tertib niaga yang diawasi (unit)	219.800	22426					22426	10,2
2 6 100 18 3	Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha (Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Malang)	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang mendapat pembinaan perlindungan konsumen (orang)	3.140	915					915	29,14
2 6 100 19	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan (wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Jember)	Persentase Jumlah temuan dalam pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga	10	22,88294628					22,88294628	228,83
2 6 100 19 1	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Jember	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran UPT PK Jember	80	80					80	100
2 6 100 19 2	Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga (Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Jember)	Jumlah barang beredar, jasa dan tertib niaga yang diawasi (unit)	219.800	8526					8526	3,88
2 6 100 19 3	Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha (Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Jember)	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang mendapat pembinaan perlindungan konsumen (orang)	3.140	89					89	2,83
2 6 100 20	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan (wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Bojonegoro)	Persentase Jumlah temuan dalam pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga	10	6,632580886					6,632580886	66,33
2 6 100 20 1	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Bojonegoro	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran UPT PK Bojonegoro	80	80					80	100
2 6 100 20 2	Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga (Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Bojonegoro)	Jumlah barang beredar, jasa dan tertib niaga yang diawasi (unit)	219.800	49483					49483	22,51

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program RENSTRA Tahun (2014-2019) dan (2019-2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Realisasi RENJA PD Tahun 2020	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Tahun 2020	% Tingkat Capaian RENSTRA Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 6 100 20 3	Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha (Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Bojonegoro)	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang mendapat pembinaan perlindungan konsumen (orang)	3.140	63					63	2,01
2 6 100 21	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan (wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Kediri)	Persentase Jumlah temuan dalam pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga	10	2,347242206					2,347242206	23,47
2 6 100 21 1	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Kediri	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran UPT PK Kediri	80	80					80	100
2 6 100 21 2	Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga (Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Kediri)	Jumlah barang beredar, jasa dan tertib niaga yang diawasi (unit)	219.800	104250					104250	47,43
2 6 100 21 3	Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha (Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Kediri)	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang mendapat pembinaan perlindungan konsumen (orang)	3.140	412					412	13,12
2 6 100 22	Program Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang UPT PSMB-LT Surabaya	Pertumbuhan sertifikasi mutu produk di UPT PSMB-LT Surabaya	1	-9,014810045					-9,014810045	-901,48
2 6 100 22 1	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT PSMB-LT Surabaya	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran UPT PSMB-LT Surabaya	80	80					80	100
2 6 100 22 2	Pelayanan Teknis Jasa Penilaian Kesesuaian dan Kalibrasi	Jumlah sertifikat penilaian kesesuaian (mutu barang dan jasa) dan kalibrasi (dokumen)	28.280	4107					4107	14,52
2 6 100 22 3	Pengembangan Jasa Penilaian Kesesuaian dan Kalibrasi	Jumlah akreditasi (surveillance, re-akreditasi dan penambahan ruang lingkup) (dokumen)	90	1					1	1,11
2 6 100 22 4	Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan di UPT PSMB-LT Surabaya	Jumlah peserta yang mendapatkan standarisasi kualitas bahan baku (orang)	2.240	20					20	0,89
2 6 100 22 5	Penerapan Inovasi Teknis di UPT PSMB-LT Surabaya	Jumlah penambahan ruang lingkup akreditasi penilaian kesesuaian (mutu barang dan jasa) dan kalibrasi (komoditi/parameter)	2	1					1	50
2 6 100 23	Program Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang UPT PSMB-LT Jember	Pertumbuhan sertifikasi mutu produk pada UPT PSMB-LT Jember	1	-9,489051095					-9,489051095	-948,91
2 6 100 23 1	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT PSMB-LT Jember	Persentase pelayanan administrasi perkantoran UPT PSMB-LT Jember	80	80					80	100
2 6 100 23 2	Pelayanan Teknis Jasa Penilaian Kesesuaian dan Kalibrasi	Jumlah sertifikat penilaian kesesuaian (mutu barang dan jasa) dan kalibrasi (dokumen)	26.960	3981					3981	14,77
2 6 100 23 3	Pengembangan Jasa Penilaian Kesesuaian dan Kalibrasi	Jumlah akreditasi (surveillance, re-akreditasi dan penambahan ruang lingkup) (dokumen)	90	4					4	4,44
2 6 100 23 4	Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan di UPT PSMB-LT Jember	Jumlah peserta yang mendapatkan standarisasi kualitas bahan baku (orang)	2.680	0					0	0
2 6 100 23 5	Penerapan Inovasi Teknis di UPT PSMB-LT Jember	Jumlah penambahan ruang lingkup akreditasi penilaian kesesuaian (mutu barang dan jasa) dan kalibrasi (komoditi/parameter)	12	13					13	108,33
2 6 100 23 6	Penyediaan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian di UPT PSMB-LT Jember	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana laboratorium (paket)	-	0					0	0

• 2021

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program RENSTRA Tahun (2014-2019) dan (2019-2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Realisasi RENJA PD s/d Triwulan II Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d TW 2 Tahun 2022	% Realisasi RENJA Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3	30	2									
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Izin yang diterbitkan	545.248			130.062	144.858	111,38	135.062	135.062	100
3	30	2	1	1							
	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	Jumlah Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	4			1	1	100	1	1	100
3	30	2	1	1							
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB (Unit Usaha)	4			1	1	100	1	1	100
3	30	2	1	1							
	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	4			1	2	200	1	1	100
3	30	2	1	2							
	Fasilitasi pemenuhan komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya (Unit Usaha)	4			1	2	200	1	1	100
3	30	2	1	2	3						
	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah SKA dan API yang diterbitkan	545.240			130.060	144.855	111,38	135.060	135.060	100
3	30	2	1	4	1						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah SKA yang diterbitkan	545.000			130.000	144.754	111,35	135.000	135.000	100
3	30	2	1	4	2						
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan API melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Importir yang difasilitasi (Pelaku Usaha)	240			60	101	168,33	60	60	100
3	30	2	1	4	2						
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pertumbuhan Sarana Distribusi Perdagangan (%)	4			1	1	100	1	1	100
3	30	3									
	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas (Sarana Perdagangan)	16			4	4	100	4	4	100
3	30	3	1	1							
	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi yang mendapat pembinaan (Sarana Perdagangan)	8			2	2	100	2	2	100
3	30	3	1	1	2						
	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengembangan Pasar Lelang Komoditas yang mendapat pembinaan (Sarana Perdagangan)	8			2	2	100	2	2	100
3	30	3	1	1	3						

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program RENSTRA Tahun (2014-2019) dan (2019-2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Realisasi RENJA PD s/d Triwulan II Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d TW 2 Tahun 2022	% Realisasi RENJA Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	30	4								
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tingkat Inflasi Bahan Makanan (%)	8		2	4	178	2	2	100
3	30	4	1	1						
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Prosentase Ketersediaan Bahan Pokok (%)	360		90	100	111,11	90	90	100
3	30	4	1	1	1					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Peserta yang mengikuti koordinasi dan sinkronisasi (Orang)	945		195	195	100	200	200	100
3	30	4	1	2						
	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Informasi)	4		1	1	100	1	1	100
3	30	4	1	2	1					
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pasar sasaran pengendalian harga dan distribusi (pasar)	464		116	116	100	116	116	100
3	30	4	1	2	2					
	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Operasi Pasar (Kali)	11		2	1	50	2	2	100
3	30	4	1	3						
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya (Kali)	148		37	37	100	37	37	100
3	30	4	1	3	1					
	Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi	Jumlah pemeriksaan Perizinan Kegiatan Distribusi (Kali)	48		12	9	75	12	12	100
3	30	4	1	3	2					
	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi (kali)	48		12	9	75	12	12	100
3	30	4	1	3	3					
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi (kali)	48		12	9	75	12	12	100
3	30	4	1	3	4					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida (kali)	4		1	1	100	1	1	100
3	30	5								
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Net Ekspor Non Migas (Milyar US\$)	4		1	0	8,6	1	1	100
3	30	5	1	1						
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang di fasilitasi Pembinaan, Promosi dan Misi Dagang Produk Ekspor (Pelaku Usaha)	437		98	98	100	98	98	100
3	30	5	1	1	1					
	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku usaha yang difasilitasi pameran dagang Internasional/Nasional (Pelaku Usaha)	84		4	4	100	4	4	100
3	30	5	1	1	3					
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	255		60	30	50	65	65	100

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program RENSTRA Tahun (2014-2019) dan (2019-2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Realisasi RENJA PD s/d Triwulan II Tahun 2022							
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d TW 2 Tahun 2022	% Realisasi RENJA Tahun 2022						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
3	30	5	1	1	4		Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Peningkatan Citra Produk Ekspor (Pelaku Usaha)	16		4	2	50	4	4	100
3	30	5	1	1	5		Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku usaha yang difasilitasi pembinaan (Pelaku Usaha)	355		30	30	100	100	100	100
3	30	6					PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan perundang-undangan (%)	320		80	80	100	80	80	100
3	30	6	1				Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Konsumen (kali)	317		77	77	100	80	80	100
3	30	6	1	1	1		Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen		-		760	760	100	990	990	100
								Jumlah Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen yang diberdayakan (wilker UPT. PK Surabaya)	1.385		315	315	100	550	550	100
								Jumlah Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen yang diberdayakan (wilker UPT. PK Malang)	950		200	200	100	200	200	100
								Jumlah Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen yang diberdayakan (wilker UPT. PK Jember)	525		75	75	100	100	100	100
								Jumlah Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen yang diberdayakan (wilker UPT. PK Bojonegoro)	520		70	70	100	100	100	100
								Jumlah Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen yang diberdayakan (wilker UPT. PK Kediri)	550		100	100	100	40	40	100
3	30	6	1	1	2		Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen		-		82	82	100			
								Prosentase Penanganan pengaduan konsumen (wilker UPT. PK Surabaya)	400		100	100	100	100	100	100
								Prosentase Penanganan pengaduan konsumen (wilker UPT. PK Malang)	352		88	88	100	88	88	100
								Prosentase Penanganan pengaduan konsumen (wilker UPT. PK Jember)	400		100	100	100	100	100	100
								Prosentase Penanganan pengaduan konsumen (wilker UPT. PK Bojonegoro)	280		40	40	100	80	80	100
								Prosentase Penanganan pengaduan konsumen (wilker UPT. PK Kediri)	320		80	80	100	100	100	100
3	30	6	1	1	3		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen		-		94	94	100	122	122	100
								Jumlah Koordinasi Dan Sinkronisasi Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa Konsumen (wilker UPT. PK Surabaya)	41		7	7	100	25	25	100
								Jumlah Koordinasi Dan Sinkronisasi Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa Konsumen (wilker UPT. PK Malang)	103		24	24	100	25	25	100

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program RENSTRA Tahun (2014-2019) dan (2019-2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Realisasi RENJA PD s/d Triwulan II Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d TW 2 Tahun 2022	% Realisasi RENJA Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Jumlah Koordinasi Dan Sinkronisasi Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa Konsumen (wilker UPT. PK Jember)	40		6	6	100	12	12	100	
		Jumlah Koordinasi Dan Sinkronisasi Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa Konsumen (wilker UPT. PK Bojonegoro)	124		30	30	100	30	30	100	
		Jumlah Koordinasi Dan Sinkronisasi Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa Konsumen (wilker UPT. PK Kediri)	121		27	27	100	30	30	100	
3	30	6	1	2							
		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	30.200		6.200	7.675	123,79	6.000	6.000	100
3	30	6	1	2	1						
		Jumlah Sertifikat yang diterbitkan		-		6.200	3.040	49,03			
		Jumlah Sertifikat yang diterbitkan di UPT PSMB LT Jember		17.200		3.700	17.100	462,16	3.000	3.000	100
		Jumlah Sertifikat yang diterbitkan di UPT PSMB LT Surabaya		13.000		2.500	1.050	42	3.000	3.000	100
3	30	6	1	2	2						
		Jumlah Akreditasi Layanan Pengujian		-		2	-	0	2	2	100
		Jumlah Akreditasi Layanan Pengujian di UPT PSMB LT Jember		4		1	-	0	1	1	100
		Jumlah Akreditasi Layanan Pengujian di UPT PSMB LT Surabaya		4		1	-	0	1	1	100
3	30	6	1	2	3						
		Jumlah Akreditasi layanan Sertifikasi		-		6	6	100	3	3	100
		Jumlah Akreditasi Layanan Sertifikasi di UPT PSMB LT Jember		12		3	3	100	1	1	100
		Jumlah Akreditasi Layanan Sertifikasi di UPT PSMB LT Surabaya		12		3	3	100	2	2	100
3	30	6	1	2	4						
		Pengembangan Layanan Kalibrasi		-		-	-	-	-	-	
		Jumlah Pengembangan layanan di UPT PSMB LT Jember		-		-	-	-	-	-	
		Jumlah Pengembangan layanan di UPT PSMB LT Surabaya		-		-	-	-	-	-	
3	30	6	1								
		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah barang/jasa yang diawasi	2.000.000		500.000	450.812	90,16	500.000	500.000	100
3	30	6	1								
		Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen		-		500.000	450.812	90,16	500.000	500.000	100
		Jumlah Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen (wilker UPT. PK Surabaya)		700.000		100.000	112.862	112,86	110.000	110.000	100
		Jumlah Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen (wilker UPT. PK Malang)		700.000		100.000	88.421	88,42	150.000	150.000	100

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program RENSTRA Tahun (2014-2019) dan (2019-2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Realisasi RENJA PD s/d Triwulan II Tahun 2022					
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d TW 2 Tahun 2022	% Realisasi RENJA Tahun 2022				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Jumlah Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen (wilker UPT. PK Jember)	700.000		100.000	31.158	31,16	102.000	102.000	100				
		Jumlah Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen (wilker UPT. PK Bojonegoro)	700.000		100.000	100.567	100,57	150.000	150.000	100				
		Jumlah Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen (wilker UPT. PK Kediri)	700.000		100.000	117.804	117,8	100.000	100.000	100				
3	30	6	1	3	2	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	-		98	69	70,41			
		Jumlah Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen (wilker UPT. PK Surabaya)	130		25	20	80	25	25	25	100			
		Jumlah Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen (wilker UPT. PK Malang)	110		20	21	105	25	25	100				
		Jumlah Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen (wilker UPT. PK Jember)	130		25	27	108	30	30	100				
		Jumlah Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen (wilker UPT. PK Bojonegoro)	74		14	11	78,57	14	14	100				
		Jumlah Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen (wilker UPT. PK Kediri)	74		14	9	64,29	15	15	100				
3	30	7				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Pelaku usaha yang difasilitasi penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1.850		90	90	100	90	100
3	30	7	1	1		Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri	360		6	6	100	7	100
3	30	7	1	1	1	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri	26		40	40	100	240	100
3	30	7	1	2		Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	180		-	-	-	-	-
3	30	7	1	2	1	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	-		-	-	-	-	-
3	30	7	1	3		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-		2	2	100	2	100
3	30	7	1	3	2	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah peserta Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	2		50	50	100	50	100
3	30	7	1	3	3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	200		5	5	100	5	100
X	XX	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai // Persentase realisasi anggaran // Indeks profesionalitas ASN	20						

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program RENSTRA Tahun (2014-2019) dan (2019-2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Realisasi RENJA PD s/d Triwulan II Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d TW 2 Tahun 2022	% Realisasi RENJA Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X XX 1 1 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75		15	15	100	15	15	100
X XX 1 1 1 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah	32		11	11	100	11	11	100
X XX 1 1 1 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	16		4	4	100	4	4	100
X XX 1 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	48		12	12	100	12	12	100
X XX 1 1 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	48		12	12	100	12	12	100
X XX 1 1 2 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48		12	12	100	12	12	100
X XX 1 1 2 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	48		12	12	100	12	12	100
X XX 1 1 2 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah	48		12	15	125	12	12	100
X XX 1 1 2 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen angan SKPD	8		2	2	100	2	2	100
X XX 1 1 2 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	48		12	12	100	12	12	100
X XX 1 1 2 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis	4		1	1	100	1	1	100
X XX 1 1 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	84		18	14	77,78	18	18	100
X XX 1 1 3 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen	4		1	1	100	1	1	100
X XX 1 1 3 3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan	4		1	1	100	1	1	100
X XX 1 1 3 4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Kegiatan	4		1	1	100	1	1	100
X XX 1 1 3 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Kegiatan dan Laporan	48		12	9	75	12	12	100
X XX 1 1 3 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan	8		2	2	100	2	2	100
X XX 1 1 3 7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen	4		1	1	100	1	1	100
X XX 1 1 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	48		12	12	100	12	12	100
X XX 1 1 5 1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	jumlah sarana dan prasana yg tepenuhi	4		1	4	400	1	1	100
X XX 1 1 5 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	48		12	12	100	12	12	100
X XX 1 1 5 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan data pegawai	48		12	12	100	12	12	100
X XX 1 1 5 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP yang tepat waktu	48		12	12	100	12	12	100
X XX 1 1 5 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	37		1	1	100	12	12	100

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program RENSTRA Tahun (2014-2019) dan (2019-2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Realisasi RENJA PD s/d Triwulan II Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d TW 2 Tahun 2022	% Realisasi RENJA Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X XX 1 1 5 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	4		1	0	0	1	1	100
X XX 1 1 5 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bintek yang dilaksanakan	8		2	2	100	2	2	100
X XX 1 1 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	44		11	6	54,55	11	11	100
X XX 1 1 6 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket pengadaan	4		1	1	100	1	1	100
X XX 1 1 6 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket pengadaan	4		1	1	100	1	1	100
X XX 1 1 6 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket pengadaan	4		1	1	100	1	1	100
X XX 1 1 6 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket pengadaan	4		1	1	100	1	1	100
X XX 1 1 6 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket pengadaan	4		1	1	100	1	1	100
X XX 1 1 6 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah paket pengadaan	4		1	1	100	1	1	100
X XX 1 1 6 7	Penyediaan Bahan/Material	jumlah paket pengadaan	4		1	1	100	1	1	100
X XX 1 1 6 8	Fasilitas Kunjungan Tamu	jumlah paket pengadaan	40		10	10	100	10	10	100
X XX 1 1 6 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	46		1	1	100	15	15	100
X XX 1 1 6 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah daftar arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital	4		1	1	100	1	1	100
X XX 1 1 6 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Informasi yang didukung	8		2	2	100	2	2	100
X XX 1 1 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4		1	0	0	1	1	100
X XX 1 1 7 4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Kendaraan	0		2	0	0			
X XX 1 1 7 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	4		1	1	100	1	1	100
X XX 1 1 7 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	18		5	6	120	5	5	100
X XX 1 1 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4		1	4	400	1	1	100
X XX 1 1 8 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman dokumen	60		15	15	100	15	15	100
X XX 1 1 8 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48		12	12	100	12	12	100
X XX 1 1 8 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah paket pelayanan umum kantor	60		15	15	100	15	15	100
X XX 1 1 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	4		1	1	100	1	1	100
X XX 1 1 9 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa	56		14	14	100	14	14	100
X XX 1 1 9 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa	56		14	14	100	14	14	100

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program RENSTRA Tahun (2014-2019) dan (2019-2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Realisasi RENJA PD s/d Triwulan II Tahun 2022						
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d TW 2 Tahun 2022	% Realisasi RENJA Tahun 2022					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
X	XX	1	1	9	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	4		1	0	0	1	1	100
X	XX	1	1	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	40		10	8	80	10	10	100
X	XX	1	1	9	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	7		1	0	0	1	1	100
X	XX	1	1	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	18		5	0	0	5	5	100
X	XX	1	1	9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana yang dipelihara	28		10	6	60	10	10	100
3	31	2				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase peningkatan pengendalian izin usaha industri	5		1	0,28	23,33	1	1	100
3	31	2	1	1		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan Industri	4		2	2	100	2	2	100
3	31	2	1	1	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri dan perdagangan	24		5	5	100	6	6	100
3	31	2	1	1	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				5.847	5847	100	5.686	5.686	100
							Jumlah Pelaku Agro yang difasilitasi	1100		225	225	100	250	250	100
							Jumlah Pelaku Non Agro yang difasilitasi	751		136	136	100	140	140	100
							Jumlah jasa pelayanan UPT Aneka Industri dan Kerajinan	1880		470	470	100	470	470	100
							Jumlah industri yang mendapatkan Pengembangan Teknis Aneka Industri dan kerajinan	250		25	25	100	50	50	100
							Jumlah jasa pelayanan UPT Industri makanan minuman dan kemasan	1800		450	450	100	38	38	100
							Jumlah industri yang mendapatkan Pengembangan Teknis Industri makanan minuman dan kemasan	550		100	100	100	700	700	100
							Jumlah jasa pelayanan UPT Industri Logam dan Perekayasaan	1060		265	265	100	105	105	100
							Jumlah industri yang mendapatkan Pengembangan Teknis Industri Logam dan Perekayasaan	1148		248	248	100	275	275	100
							Jumlah jasa pelayanan UPT Industri Kayu dan Produk Kayu	2800		700	700	100	700	700	100
							Jumlah industri yang mendapatkan Pengembangan Teknis Industri Kayu dan Produk Kayu	550		100	100	100	150	150	100
							Jumlah jasa pelayanan UPT Industri Kulit dan Produk Kulit	6000		1.500	1500	100	1.500	1.500	100

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program RENSTRA Tahun (2014-2019) dan (2019-2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Realisasi RENJA PD s/d Triwulan II Tahun 2022						
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d TW 2 Tahun 2022	% Realisasi RENJA Tahun 2022					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		Jumlah industri yang mendapatkan Pengembangan Teknis Industri Kulit dan Produk Kulit	550		100	100	100	125	125	100					
		Jumlah Pelaku Industri yang mendapatkan pelayanan Mutu Produk Industri dan dan Pelatihan Desain Produk Industri di wilayah kerja UPT PMPI-TK Surabaya	2326		526	526	100	583	583	100					
		Jumlah Pelaku Industri yang mendapatkan pelayanan Mutu Produk Industri dan dan Pelatihan Desain Produk Industri di wilayah kerja UPT PMPI-TK Malang	2952		1.002	1002	100	600	600	100					
3	31	2	1	1	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Terkait KIHT	2	2	100	-	-			
3	31	2	1	1	6	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri yang disusun	4	1	1	100	1	1	100	
3	31	3				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Prosentase peningkatan pengendalian izin usaha industri	10		38,46	384,6	10	10	100	
3	31	3	1	1		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	96		24	24	100	24	100	
3	31	3	1	1	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah industri yang difasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI	48		12	12	100	12	100	
3	31	3	1	1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah industri yang diawasi	48		12	12	100	12	100	
3	31	4				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Industri yang telah terdaftar dalam SIINas	20		20	16,35	81,75	20	20	100
3	31	4	1	1		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	8		2	2	100	2	2	100
3	31	4	1	1	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah data industri yang dianalisa	16		4	4	100	4	4	100
3	31	4	1	1	2	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Diseminasi dan Publikasi Data Informasi industri	8		2	2	100	2	2	100
3	31	4	1	1	3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah industri yang dipantau	48		12	3	25	12	12	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis antara lain :

a. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan tercapai 3,36 %

Berdasarkan data BPS tahun dasar 2010, secara kumulatif nilai PDRB ADHB sektor industri pengolahan Jawa Timur pada tahun 2021 mencapai Rp. 754,04 trilyun dengan memberikan kontribusi sebesar 23,08% terhadap PDB ADHB sektor industri pengolahan Nasional yang mencapai nilai sebesar Rp. 3.266,9 trilyun pada tahun yang sama, adapun perbandingannya kinerja dapat dilihat pada grafik 3.1. Sedangkan pada PDRB ADHB sektor industri pengolahan di Jawa Timur pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi Rp. 754,04 trilyun dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp. 705,76 trilyun. Sehingga laju pertumbuhan pada tahun 2021 dapat dihitung meningkat sebesar 3,36% dari tahun sebelumnya, namun masih dibawah nasional yang menunjukkan pelambatan laju sebesar 3,39%. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada grafik 3.2 bahwa industri pengolahan baik Nasional maupun Jawa Timur mengalami peningkatan laju yang cukup signifikan di tahun 2021.

Pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan mengalami peningkatan seiring dengan beberapa kebijakan terkait pemulihan ekonomi nasional khususnya di sektor industri. Beberapa sub sektor industri pengolahan tercatat mampu menunjukkan peningkatan seperti Industri makanan dan minuman dan Industri kimia, farmasi dan obat tradisional yang tetap tumbuh positif karena ditopang naiknya hasil produksi pertanian dan upaya masyarakat dalam peningkatan kualitas kesehatan.

b. Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 7,83 %

PDRB ADHK sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor di Jawa Timur pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi Rp. 312,31 trilyun dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp. 289,80 trilyun. Sehingga laju pertumbuhan pada tahun 2021 dapat dihitung meningkat sebesar 7,76% dari tahun sebelumnya, diatas angka nasional yang menunjukkan pelambatan laju sebesar 4,65%. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada grafik 3.5 bahwa sektor perdagangan baik Nasional maupun Jawa Timur mengalami peningkatan laju yang cukup signifikan di tahun 2021 Hal ini terutama

disebabkan oleh perbaikan kinerja konsumsi di hampir seluruh provinsi di Indonesia seiring dengan upaya pemulihan ekonomi nasional.

c. Peningkatan barang yang diawasi dan sertifikasi barang beredar 5,3

Peningkatan barang yang diawasi dan sertifikasi barang beredar tercapai sebesar 5,3 dimana pada tahun 2021 terjadi peningkatan dari sisi pengawasan barang beredar maupun dari pengujian sertifikasi mutu barang. Pada pengawasan barang naik sebesar 5,28% dibanding tahun 2020, selain dikarenakan adanya efisiensi anggaran serta adanya pembatasan aktivitas di sarana perdagangan sehingga pelaksanaan pengawasan barang dan jasa menjadi berkurang. Sedangkan untuk sertifikasi mutu barang naik sebesar 6,36 % karena adanya penurunan dari pelaku usaha dalam pelaksanaan uji sertifikasi dimana hal ini dipengaruhi juga oleh penurunan permintaan barang export karena dampak Covid-19.

Tabel barang yang diawasi dan sertifikasi barang beredar :

Rumusan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Barang Diawasi...(A)	727.628	790.036	906.996	414.898	436.812
Sertifikasi Mutu Produk...(B)	6.127	6.795	7.947	7.215	7.675
TOTAL (A) + (B) <i>(Jumlah barang & sertifikat)</i>	733.755	796.831	914.943	422.113	444.487
Peningkatan (A) ... (%)	-	8,58	14,80	-54,26	5,28
Peningkatan (B) ... (%)	-36,68	10,90	16,95	-9,21	6,36
<i>Peningkatan Barang yang Diawasi & Sertifikasi Mutu Produk (%)</i>	-	8,60	14,82	-53,86	5,30

d. Pertumbuhan net ekspor perdagangan dalam negeri

Net ekspor antar daerah terapresiasi dari -26,6% (yoy) pada tahun 2020 menjadi 74,36% (yoy) pada tahun 2021. Hal ini disebabkan karena naiknya permintaan domestik yang didukung oleh pertumbuhan makro ekonomi yang semakin membaik pasca pandemi. Perdagangan antar daerah pun semakin terakselerasi sebagai dampak pembatasan mobilitas antar wilayah yang berlangsung kurang lebih dua tahun.

e. Pertumbuhan net ekspor non migas

Pertumbuhan net ekspor non migas di Jawa Timur mengalami penurunan cukup signifikan di Tahun 2021 yaitu sebesar **-105,47** meskipun nilai ekspor naik akan tetapi peningkatan impor lebih tinggi. Dengan rumus pertumbuhan sebagai berikut

Tahun	USD (Triliun)		Net Ekspor	% Pertumbuhan
	EKSPOR	IMPOR		
2016	17,94	15,65	2,30	173,25
2017	18,38	17,85	0,53	(76,97)
2018	19,11	20,71	(1,60)	(402,03)
2019	19,37	18,93	0,44	(127,27)
2020	18,27	16,81	1,46	235,96
2021	21,30	21,38	(0,08)	(105,47)

f. Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 90,24

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Dinas perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur memperoleh nilai 90,24 atau predikat AA. Penilaian tersebut menunjukkan memuaskan dalam memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya sudah cukup memadai, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan berorientasi pada hasil rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Komponen	Bobot	Nilai 2019	Nilai 2020
a.	Perencanaan kinerja	30%	28,05	28,3
b.	Pengukuran kinerja	25%	22,50	22,50
c.	Pelaporan kinerja	15%	13,56	13,56
d.	Evaluasi Kinerja	10%	8,77	8,77
e.	Pencapaian Kinerja	20%	17,12	17,11
Nilai Hasil Evaluasi		100%	90,00	90,24
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			AA	AA

g. PAD mengalami kenaikan dari Target yang ditetapkan.

Hal ini disebabkan adanya antisipasi penurunan PAD pada Tahun 2021 akibat pandemi covid-19 yang ternyata tidak terlalu berdampak pada hasil penerimaan PAD hingga akhir tahun 2021 serta adanya penerimaan pendapatan Lain-lain yang syah pada tahun 2021 diantaranya Denda Retribusi dan Pengembalian Belanja Daerah diantaranya Kelebihan bayar

h. Kinerja Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2021 pencapaian target pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur mengalami hambatan karena capaian target realisasi anggaran sudah sesuai dengan perencanaan dan mencapai nilai optimal dikarenakan adanya belanja hibah yang tidak dapat direalisasikan karena calon penerima hibah tidak memenuhi syarat.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Disperindag Provinsi Jawa Timur (T-C.30)

NO	INDIKATOR	TUJUAN	SASARAN	SPM	IKK/PMD 18/2020/ RAKOERTEK	MCP	Target Renstra PD				REALISASI		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
							2020	2021	2022	2023	2020	2021	2023	2024	
1	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)	v						3,18	5,02	5,93	-2,06	3,36	5,32		
2	Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi (%)	v						0,14	3,08	4,69	-5,74	7,83	4,69		
3	Nilai PDRB industri pengolahan (Triliun Rp)		v					700	725	750	705,79	753,99	750		
4	Nilai PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi (%)		v					311,48	331,26	352,72	412,11	452,71	352,72		
5	Persentase peningkatan barang yang diawasi dan sertifikasi barang beredar (%)		v					1	1	1	-53,86	5,30	1		
6	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		v					86,40	86,60	86,80	90,24		86,8		
7	Inflasi Pangan Bergejolak				v			2	2	2	2,14	3,56	3-5		
8	Pertumbuhan nilai ekspor non migas				v			1	1	1	1	16,59	5,96-7,86		
9	Persentase penanganan pengaduan konsumen				v			100	100	100	100	100	100		
10	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan				v			90	90	90	95,36	95,42	90		
11	Persentase komoditi potensial yang sesuai				v			50	50	50	26,63	13,04	50-75		

NO	INDIKATOR	TUJUAN	SASARAN	SPM	IKK/PMD 18/2020/ RAKOERTEK	MCP	Target Renstra PD				REALISASI		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
							2020	2021	2022	2023	2020	2021	2023	2024	
	dengan ketentuan berlaku														
12	Tertib Usaha				v			100	100	100	100	100	100		
13	Persentase kinerja realisasi pupuk				v			95	95	95	97,7	90,21	90		
14	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok				v			10	10	10	10,93	8,88	8-9		
15	Persentase Pertumbuhan PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas				v			3,18	5,02	5,93	-2,06	3,36	5,32		
16	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB				v			30	31	32	30,69	30,72	30,40		
17	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)				v			20	21	22	18,27	21,30	21		
18	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas				v			3,2 juta	3,25 juta	3,3 juta	3,2 juta	3,37 juta	3,3 juta		
19	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)				v			69,5 triliun	69,6 triliun	69,7 triliun	69,39	23,68 triliun	35 triliun		

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

Terdapat beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, yaitu antara lain sebagai berikut :

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur melaksanakan beberapa koordinasi dan sinergi program baik Pemerintah Kab./Kota maupun Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, diantaranya :

- a. Memperkuat sinergitas pembangunan industri untuk mewujudkan industrialisasi.

Dalam rangka mendukung Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yang telah ditetapkan melalui PP No.14 Tahun 2015 maka Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu provinsi yang

mendukung sinergitas pembangunan industri nasional telah menetapkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Jawa Timur Tahun 2019-2039. Sehingga koordinasi dan evaluasi penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kab./Kota (RPIK) terus dilakukan untuk memperkuat sinergitas pembangunan industri baik antar wilayah maupun antar sektor produksi. Diantaranya kawasan industri, standardisasi industri, industri hijau dan industri kecil dan menengah serta pengendalian perizinan industri.

b. Stabilisasi dan ketersediaan bahan penting dan barang pokok.

Beberapa prioritas dalam penyediaan informasi harga pokok adalah optimalisasi Sistem Informasi Ketersediaan dan Harga Bahan Pokok (Siskaperbappo) dan penyediaan layar monitor informasi harga. Optimalisasi siskaperbappo pada tahun 2023 antara lain meliputi penyediaan informasi harga dari sentra-sentra produksi bahan pokok di Jawa Timur agar dapat dilakukan pemantauan disparitas harga di tingkat produsen dan konsumen akhir serta penyediaan layar monitor harga di beberapa pasar. Pada tahun 2023, optimalisasi ini perlu ditingkatkan dengan menambah jangkauan dan jenis informasi yang disediakan.

Permasalahan dan hambatan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan koordinasi dan sinergi program baik pada pemerintah kab./kota maupun pada Kementerian Perindustrian dan Perdagangan adalah kondisi dimana kurangnya komunikasi dan koordinasi yang sempurna antar pihak dan antar lembaga. Sehingga perlu sinergitas antar lini pada perencanaan dengan pelaksanaan serta evaluasi yang dilaksanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, adalah sebagaimana tabel T-C.31 berikut:

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD (Tabel T-C.31)

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN							
KODE			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
3	30	2		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Ijin yang diterbitkan		135.062	457.116.000	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Ijin yang diterbitkan	135.062	180.244.000	
3	30	2	101	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	Jumlah Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor		1	18.150.000	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	Jumlah Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	1	18.350.000	
3	30	2	101	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		2	18.150.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2	18.350.000
3	30	2	102	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi		1	38.966.000	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	1	35.964.000	
3	30	2	102	3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission		5	38.966.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	5	35.964.000
3	30	2	104	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah SKA dan API yang diterbitkan		135.060	400.000.000	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah SKA dan API yang diterbitkan	135.060	125.930.000	
3	30	2	104	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal		135.000	200.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	135.000	82.186.000
3	30	2	104	2	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan API melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Angka Pengenal Importir yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		3	200.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan API melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Angka Pengenal Importir yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	3	43.744.000

RANCANGAN AWAL RKPД						HASIL ANALISA KEBUTUHAN							
KODE				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3	30	3		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pertumbuhan Sarana Distribusi Perdagangan		1	263.218.000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pertumbuhan Sarana Distribusi Perdagangan		1	406.200.600
3	30	3	101	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas		4	263.218.000	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas		4	406.200.600
3	30	3	101	2 Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi		4	75.410.000	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi		4	272.616.600
3	30	3	101	3 Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi		2	187.808.000	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi		2	133.584.000
3	30	4		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tingkat Inflasi Bahan Makanan		2	1.587.621.600	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tingkat Inflasi Bahan Makanan		2	1.060.886.000
3	30	4	101	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Prosentase Ketersediaan Bahan Pokok		90	9.060.000	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Prosentase Ketersediaan Bahan Pokok		90	14.040.000
3	30	4	101	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor		1	9.060.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor		1	14.040.000
3	30	4	102	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		1	1.543.191.600	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		1	1.031.980.000
3	30	4	102	1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota		12	1.062.860.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota		12	923.660.000
3	30	4	102	2 Operasi Pasar dalam rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		11	480.331.600	Operasi Pasar dalam rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		11	108.320.000
3	30	4	103	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya		37	35.370.000	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya		37	14.866.000

RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
KODE		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya				
3	30	4	103	1			Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi	Jumlah Laporan Pemeriksaan Kegiatan Distribusi		1	3.960.000
3	30	4	103	2			Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi		1	3.960.000
3	30	4	103	3			Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%		1	3.946.000
3	30	4	103	4			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida		1	3.000.000
3	30	5					PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Net Ekspor Non Migas		1	274.070.000
3	30	5	101				Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang di fasilitasi Pembinaan, Promosi dan Misi Dagang Produk Ekspor		98	274.070.000
3	30	5	101	1			Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang		2	63.450.000
3	30	5	101	3			Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan		80	134.620.000
3	30	5	101	4			Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi		120	38.000.000
3	30	5	101	5			Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina		120	38.000.000
3	30	6					PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan perundang-undangan		80	1.929.719.725
3	30	6	101				Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Konsumen		80	914.898.585
3	30	6	101	1			Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif		5	466.516.675
3	30	6	101	2			Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif		30	157.237.430
3	30	6	101	3			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani		181	291.144.480

RANCANGAN AWAL RKPД						HASIL ANALISA KEBUTUHAN							
KODE				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3	30	6	102		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	6.000	1.101.379.899	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk		6.000	728.892.640
3	30	6	102	1	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	17	715.185.469	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau		17	483.483.440
3	30	6	102	2	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	4.500	231.777.430	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang		4.500	84.143.200
3	30	6	102	3	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	12	154.417.000	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan		12	161.266.000
3	30	6	103		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah barang/jasa yang diawasi	612.000	316.723.598	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah barang/jasa yang diawasi		612.000	285.928.500
3	30	6	103	1	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	96	235.573.598	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi		96	208.008.000
3	30	6	103	2	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Kasus yang Ditangani	141	81.150.000	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Kasus yang Ditangani		101	77.920.500
3	30	7			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Pelaku usaha yang difasilitasi penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	90	12.092.044.400	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Pelaku usaha yang difasilitasi penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		90	7.655.520.400
3	30	7	101		Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah pelaksanaan promosi perdagangan antar provinsi	7	12.053.184.400	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah pelaksanaan promosi perdagangan antar provinsi		7	7.639.416.400
3	30	7	101	1	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kebersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	257	12.053.184.400	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kebersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri		200	7.639.416.400
3	30	7	103		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	2	38.860.000	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		2	16.104.000
3	30	7	103	2	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1	4.660.000	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		1	11.664.000
3	30	7	103	3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1	34.200.000	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan		1	4.440.000
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase peningkatan unit usaha industri	1	11.166.561.222	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase peningkatan unit usaha industri		1	10.451.906.722
3	31	2	101		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan Industri	2	11.166.561.222	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan Industri		2	10.451.906.722
3	31	2	101	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1	225.000.000	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri		1	25.000.000

RANCANGAN AWAL RPKD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN										
KODE		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
3	31	2	101	2			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		2	50.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		2	50.000.000
3	31	2	101	3			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		138	9.691.561.222	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		128	5.776.906.722
3	31	2	101	4			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		2	100.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		2	4.050.000.000
3	31	2	101	5			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		20	1.000.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		10	500.000.000
3	31	2	101	6			Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		4	100.000.000	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		4	50.000.000
3	31	3					PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Prosentase peningkatan pengendalian izin usaha industri		10	40.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Prosentase peningkatan pengendalian izin usaha industri		10	35.000.000
3	31	3	101				Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi		24	40.000.000	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi		24	35.000.000
3	31	3	101	1			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi: 1) Industri Besar; dan 2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota, 3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi		2	20.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi: 1) Industri Besar; dan 2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota, 3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi		2	10.000.000

RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISA KEBUTUHAN								
KODE		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
3	31	3	101	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi		2	20.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi		2	25.000.000
3	31	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Industri yang telah terdaftar dalam SIINas		20	85.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Industri yang telah terdaftar dalam SIINas		20	90.000.000
3	31	4	101		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		2	85.000.000	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		2	90.000.000
3	31	4	101	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		1	20.000.000	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		1	10.000.000
3	31	4	101	2	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas		1	50.000.000	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas		1	65.000.000
3	31	4	101	3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas		1	15.000.000	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas		1	15.000.000
3	31	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai		90	109.580.810.804	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai		90	95.400.195.553
						Persentase realisasi anggaran		88.5			Persentase realisasi anggaran		88.5	
						Indeks profesionalitas ASN		93			Indeks profesionalitas ASN		93	
3	31	1	01.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		20	650.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		20	410.000.000
3	31	1	01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5	300.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5	200.000.000
3	31	1	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1	2.000.000
3	31	1	01.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1	2.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN									
KODE		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3	31	1	01.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1	2.000.000	
3	31	1	01.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1	2.000.000	
3	31	1	01.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1	40.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1	2.000.000	
3	31	1	01.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4	300.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4	200.000.000	
3	31	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan		12	74.997.131.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan		12	67.045.963.000	
3	31	1	01.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		250	73.335.405.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		250	65.418.646.000	
3	31	1	01.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12	1.522.726.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12	1.567.116.000	
3	31	1	01.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12	100.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12	25.000.000	
3	31	1	01.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12	20.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12	19.591.600	
3	31	1	01.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		12	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		12	9.000.000	
3	31	1	01.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		12	2.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		12	1.039.400	
3	31	1	01.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12	4.200.000	
3	31	1	01.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1	2.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1	1.370.000	
3	31	1	01.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		20	111.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		20	71.000.000	
3	31	1	01.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1	1.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1	1.000.000	
3	31	1	01.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1	50.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1	20.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN							
KODE		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
3	31	1	01.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1	10.000.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	10.000.000
3	31	1	01.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		1	10.000.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	10.000.000
3	31	1	01.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		2	20.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	10.000.000
3	31	1	01.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1	10.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	10.000.000
3	31	1	01.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1	10.000.000	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1	10.000.000
3	31	1	01.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		12	755.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	12	254.000.000
3	31	1	01.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		1	50.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	74.000.000
3	31	1	01.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		465	325.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-
3	31	1	01.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1	20.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	20.000.000
3	31	1	01.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		1	20.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	20.000.000
3	31	1	01.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1	100.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	50.000.000
3	31	1	01.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		4	200.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	50.000.000
3	31	1	01.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		10	20.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10	20.000.000
3	31	1	01.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan		10	20.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	10	20.000.000
3	31	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa		11	2.755.007.506	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	11	2.250.918.440
3	31	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		17	80.564.121	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17	58.071.242
3	31	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		38	336.388.959	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	37	299.788.640
3	31	1	01.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		21	130.724.694	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	135.673.825
3	31	1	01.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		46	560.072.517	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	46	482.822.465
3	31	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		23	167.892.061	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	23	164.125.569

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN							
KODE		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
3	31	1	01.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		593	82.540.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	581	51.560.000
3	31	1	01.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		4	125.700.000	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3	56.650.000
3	31	1	01.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		237	105.058.568	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	237	87.806.000
3	31	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		181	1.131.066.586	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	181	879.420.700
3	31	1	01.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1	10.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	10.000.000
3	31	1	01.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1	25.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	25.000.000
3	31	1	01.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3	426.470.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	135.760.000
3	31	1	01.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		-	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-
3	31	1	01.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		-	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-
3	31	1	01.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		3	118.000.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	28.000.000
3	31	1	01.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		20	293.470.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13	92.760.000
3	31	1	01.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		-	15.000.000	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	-	15.000.000
3	31	1	01.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-
3	31	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1	27.810.704.707	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	23.758.490.135
3	31	1	01.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		58	36.637.164	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	58	25.317.000
3	31	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		169	4.040.166.046	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	169	3.734.788.115
3	31	1	01.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2	30.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	5.000.000
3	31	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		141	23.703.901.497	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	141	19.993.385.020

RANCANGAN AWAL RKPД						HASIL ANALISA KEBUTUHAN							
KODE				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3	31	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.074.997.591	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara		1	1.474.063.978
3	31	1	01.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		25	169.041.337	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		25	145.693.187
3	31	1	01.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		61	651.373.054	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		61	535.053.256
3	31	1	01.09	5	Pemeliharaan Mebel		1	20.000.000	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		1	10.000.000
3	31	1	01.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		170	258.583.200	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		170	225.494.785
3	31	1	01.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		1	20.000.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		1	25.000.000
3	31	1	01.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1	44.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	27.840.000
3	31	1	01.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		7	412.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		7	304.982.750
3	31	1	01.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		3	500.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2	200.000.000
								137.923.631.000					117.483.743.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Penelaahan usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur diperoleh dari pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Jawa Timur, adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan melukan peningkatan mutu produk baik dari kualitas dan kuantitasnya guna meningkatnya daya saing produk industri di Jawa Timur,.
2. Perlu adanya peningkatan perdagangan dalam dan luar negeri terutama ekspor jatim, dimana net ekspor luar negeri jatim mengalami defisit. Diperlukan peningkatan stabilitas harga dipasar dalam mendukung perekonomian masyarakat. .

Berdasarkan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran dimaksud serta memperhatikan kesesuaian program/kegiatan yang ada, maka usulan pemangku kepentingan diakomodir sebagaimana table berikut:

Tabel 2.5.1

Usulan Kabupaten Kota hasil pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun 2022 yang di akomodir (Tabel T-C.32)

NO	KAB/KOTA	USULAN KAB KOTA				HASIL VERIFIKASI					KETRANGAN
		Uraian Usulan	Target	Satuan	Lokasi	Target	Satuan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	
1	Kabupaten Bangkalan	Perlindungan konsumen			Kabupaten Bangkalan, Kab. Bangkalan			STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			Dilaksanakan sesuai kegiatan rutin UPT Perlindungan Konsumen Surabaya
2	Kabupaten Bangkalan	Promosi dagang melalui misi dagang			Kabupaten Bangkalan, Kab. Bangkalan			PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Dapat difasilitasi kepesertaan melalui proses seleksi dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
3	Kabupaten Bangkalan	Promosi			Kabupaten Bangkalan, Kab. Bangkalan			PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Dapat difasilitasi kepesertaan melalui proses seleksi dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
4	Kabupaten Banyuwangi	Bantuan Pelatihan dan Peralatan IKM Kopi untuk Mendukung Ijen Geopark untuk sisi Banyuwangi			IKM di kecamatan Glagah dan Kecamatan Licin, Kab. Banyuwangi			PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dapat difasilitasi dalam kepesertaan pelatihan dan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
5	Kabupaten Banyuwangi	Bantuan Pelatihan dan Peralatan IKM Alumunium untuk Pulihkan Ekonomi Sentra Alumunium			Kecamatan Kalibaru, Kab. Banyuwangi			PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dapat difasilitasi kepesertaan pelatihan dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
6	Kabupaten Bojonegoro	Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual (Merk) Dagang			Kab. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro			PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dapat difasilitasi melalui proses seleksi dokumen dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

NO	KAB/KOTA	USULAN KAB KOTA				HASIL VERIFIKASI					KETRANGAN
		Uraian Usulan	Target	Satuan	Lokasi	Target	Satuan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	
7	Kabupaten Bondowoso	Minimnya wawasan pelaku usaha terkait tata niaga perdagangan			Kabupaten Bondowoso, Kab. Bondowoso						Dapat difasilitasi kepesertaan sosialisasi tata niaga perdagangan dan menyesuaikan ketersediaan anggaran
8	Kabupaten Bondowoso	Kurangnya dukungan promosi produk-produk lokal daerah			Kabupaten Bondowoso, Kab. Bondowoso			PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Dapat difasilitasi kepesertaan melalui proses seleksi dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
9	Kabupaten Bondowoso	pelaksanaan pameran produk unggulan sebagai sarana promosi produk			Kabupaten Bondowoso, Kab. Bondowoso			PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Dapat difasilitasi kepesertaan melalui proses seleksi dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
10	Kabupaten Bondowoso	Produk Kopi Wilayah Argopuro perlu dibina dan dikembangkan menjadi lebih baik sehingga meningkatkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat			Kabupaten Bondowoso, Kab. Bondowoso						Usulan PETI KOIN BERMANTRA: Dapat difasilitasi dengan catatan proposal Peti Koin Bermantra agar diperbarui dan sasaran disesuaikan.
11	Kabupaten Jombang	terfasilitasinya pemasaran produk kualitas ekspor (batik)			Kab Jombang, Kab. Jombang						Dapat difasilitasi melalui kepesertaan dengan proses seleksi dan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
12	Kabupaten Jombang	terfasilitasinya pemasaran produk kualitas ekspor (manik-manik)			Kab. Jombang, Kab. Jombang						Dapat difasilitasi melalui kepesertaan dengan proses seleksi dan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
13	Kabupaten Jombang	terfasilitasinya pemasaran produk kualitas ekspor (mebel)			Kab. Jombang, Kab. Jombang						Dapat difasilitasi melalui kepesertaan dengan proses seleksi dan menyesuaikan

NO	KAB/KOTA	USULAN KAB KOTA				HASIL VERIFIKASI					KETRANGAN
		Uraian Usulan	Target	Satuan	Lokasi	Target	Satuan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	
											dengan ketersediaan anggaran.
14	Kabupaten Jombang	terfasilitasinya pemasaran produk kualitas ekspor (cor kuningan)			Kab. Jombang, Kab. Jombang						Dapat difasilitasi melalui kepesertaan dengan proses seleksi dan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
15	Kabupaten Jombang	terfasilitasinya pemasaran produk kualitas ekspor (kopi nusantara)			Kab. Jombang, Kab. Jombang						Dapat difasilitasi melalui kepesertaan yang dilaksanakan oleh Provinsi dengan proses seleksi dan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
16	Kabupaten Kediri	Pengembangan industri serat nanas dalam rangka peningkatan ekspor			Kec. Ngancar Kab. Kediri, Kab. Kediri			PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dapat difasilitasi sebagai kepesertaan pelatihan dan menyesuaikan dengan prioritas Provinsi dan ketersediaan anggaran.
17	Kabupaten Madiun	Belum optimalnya standarisasi produk yang dapat diekspor			Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kab. Madiun			PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dapat difasilitasi melalui proses seleksi dan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
18	Kabupaten Magetan	Perlunya Pelatihan Safety Shoes			Kabupaten Magetan, Kab. Magetan			PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dapat difasilitasi melalui kepesertaan pelatihan dan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

NO	KAB/KOTA	USULAN KAB KOTA				HASIL VERIFIKASI					KETRANGAN
		Uraian Usulan	Target	Satuan	Lokasi	Target	Satuan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	
19	Kabupaten Magetan	Perlunya Pelatihan Marketing Online			Kabupaten Magetan, Kab. Magetan			PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dapat difasilitasi melalui kepesertaan pelatihan dan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
20	Kabupaten Magetan	Perlunya Pelatihan dan bantuan peralatan IKM Batik			Kabupaten Magetan, Kab. Magetan			PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dapat difasilitasi melalui kepesertaan pelatihan dan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
21	Kabupaten Magetan	Perlunya Pelaksanaan Misi Dagang			Kabupaten Magetan, Kab. Magetan						Dapat difasilitasi melalui kepesertaan dengan proses seleksi dan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
22	Kabupaten Malang	Membutuhkan Pelatihan Peningkatan kerajinan Anyaman Mendong			Desa Blayu Kecamatan Wajak, Kab. Malang			PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Usulan PETI KOIN BERMANTRA: Dapat difasilitasi kepesertaan pelatihan dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
23	Kabupaten Malang	Fasilitasi Pendaftaran merk Bagi produk Unggulan IKM			Kab. Malang, Kab. Malang			PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dapat difasilitasi melalui proses verifikasi dokumen dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
24	Kabupaten Malang	Pelatihan Ekspor Impor Bagi Pelaku Usaha Industri Yang berpotensi Ekspor			Kab. Malang, Kab. Malang						Dapat difasilitasi kepesertaan sosialisasi tata niaga ekspor dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
25	Kabupaten Malang	Pelaksanaan Misi Dagang untuk Potensi Unggulang Kabupaten Malang			Kab. Malang, Kab. Malang						Dapat difasilitasi kepesertaan melalui proses seleksi dan disesuaikan dengan

NO	KAB/KOTA	USULAN KAB KOTA				HASIL VERIFIKASI					KETRANGAN
		Uraian Usulan	Target	Satuan	Lokasi	Target	Satuan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	
											ketersediaan anggaran serta menyesuaikan dengan agenda Provinsi.
26	Kabupaten Ngawi	Sosialisasi tentang Perlindungan konsumen			Kabupaten ngawi, Kab. Ngawi			STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			Dapat difasilitasi kepesertaan dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
27	Kabupaten Ngawi	Pameran dagang Nasional			Jakarta, Surabaya dan Jogjakarta, Kab. Ngawi						Dapat difasilitasi kepesertaan melalui proses seleksi dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
28	Kabupaten Ngawi	Fasilitasi sertifikat halal			Kabupaten Ngawi, Kab. Ngawi			PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dapat difasilitasi melalui proses seleksi dokumen dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
29	Kabupaten Pacitan	Peningkatan Perlindungan Konsumen terhadap 30 toko swalayan			Kab. Pacitan, Kab. Pacitan						Pelaksanaan dilaksanakan secara rutin oleh UPT PK Kediri dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
30	Kabupaten Pacitan	Keterbatasan teknologi, sumber daya manusia dengan kualitas yang baik (manajemen dan teknik produksi)			Kab. pacitan, Kab. Pacitan			PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dapat difasilitasi melalui kepesertaan pelatihan Gula Kelapa dan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
31	Kabupaten Pacitan	Pelatihan/pembinaan ekspor bagi 20 orang calon eksportir			Kab. Pacitan, Kab. Pacitan						Dapat difasilitasi kepesertaan pelatihan (coaching clinic) melalui proses seleksi dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
32	Kabupaten Pacitan	Peningkatan akses pemasaran bagi 5 UMKM (30 orang)			Kab. Pacitan, Kab. Pacitan						Dapat difasilitasi kepesertaan melalui proses seleksi dan

NO	KAB/KOTA	USULAN KAB KOTA				HASIL VERIFIKASI					KETRANGAN
		Uraian Usulan	Target	Satuan	Lokasi	Target	Satuan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	
											disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
33	Kabupaten Pacitan	Promosi dagang melalui misi dagang untuk 10 orang pengusaha untuk menaikkan omzet di wilayah Kalimantan Barat dan Bali			Kab. Pacitan, Kab. Pacitan						Dapat difasilitasi kepesertaan misi dagang melalui proses seleksi, lokasi menyesuaikan dengan agenda Provinsi dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
34	Kabupaten Pasuruan	Sosialisasi Peraturan tentang Ekspor dan Standart Produk Ekspor			Kabupaten Pasuruan, Kab. Pasuruan						Difasilitasi kepesertaan untuk pelaku usaha dan aparaturnya serta disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
35	Kabupaten Pasuruan	Pelatihan Batik Cap (Kualitas dan pemasaran produk masih perlu ditingkatkan)			Desa Kemantren Kecamatan Rejoso, Kab. Pasuruan						Dapat difasilitasi kepesertaan pelatihan dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
36	Kabupaten Pasuruan	Pelatihan Barista (Belum ada kegiatan pelatihan ketrampilan teknis barista di Kabupaten Pasuruan)			Desa Kalipucang Kecamatan Tukur, Kab. Pasuruan						Dapat difasilitasi kepesertaan dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Perlu informasi lebih lanjut terkait potensi/jumlah barista di Kab Pasuruan.
37	Kabupaten Ponorogo	Masih kurangnya perluasan pasar produk unggulan daerah yang berorientasi ekspor Rp. 213.230.000			Ponorogo, Kab. Ponorogo						Dapat difasilitasi kepesertaan melalui proses seleksi dan menyesuaikan ketersediaan anggaran
38	Kabupaten Sampang	Pengembangan IKM di Kabupaten Sampang masih belum optimal (PETI KOIN BERMATRA)			1. Desa Montor Kec. Banyuates 2. Desa Torjunan Kecamatan Robatal, Kab. Sampang						Dapat difasilitasi melalui kepesertaan pelatihan penyamakan kulit dan diversifikasi produk kulit serta

NO	KAB/KOTA	USULAN KAB KOTA				HASIL VERIFIKASI					KETRANGAN
		Uraian Usulan	Target	Satuan	Lokasi	Target	Satuan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	
											menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
39	Kabupaten Sidoarjo	Potensi Produk Unggulan IKM Sidoarjo yang baik mempunyai pangsa pasar yang besar sehingga membutuhkan pemasaran yang baik melalui pameran dagang. Jumlah IKM Sidoarjo yang cukup banyak membutuhkan fasilitasi perluasan pasar melalui kegiatan pameran.			Kabupaten Sidoarjo, Kab. Sidoarjo						Dapat difasilitasi dalam kepesertaan promosi melalui proses seleksi dan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
40	Kabupaten Sidoarjo	Sebagian besar IKM tidak paham mengenai regulasi/ aturan, mekanisme, prosedur HKI, Halal, Merek dll.			Kabupaten Sidoarjo, Kab. Sidoarjo						Dapat difasilitasi sebagai kepesertaan sosialisasi standarisasi (melalui mobil keliling layanan standarisasi) dan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
41	Kabupaten Sumenep	Beberapa kecamatan perlu dilaksanakan pengawasan terhadap barang beredar			Kec. Kota, Kec. Lenteng, dan Kec. Pragaan, Kab. Sumenep						Pelaksanaan dilaksanakan secara rutin oleh UPT PK Surabaya.
42	Kabupaten Sumenep	Minimnya pelaku usaha unggulan yang ikut serta dalam misi dagang (4 Pelaku usaha)			Kec. Kota, Kec. Bluto, Kab. Sumenep						Dapat difasilitasi kepesertaan melalui proses seleksi, lokasi dan jadwal menyesuaikan dengan agenda Provinsi serta disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
43	Kabupaten Sumenep	Beberapa produk UMKM membutuhkan akses pemasaran yang lebih luas (10 Pelaku usaha)			Kec. Manding, Kalianget, Rubaru, Pragaan, Saronggi, Bluto, Kab. Sumenep						Dapat difasilitasi kepesertaan melalui proses seleksi dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran

NO	KAB/KOTA	USULAN KAB KOTA				HASIL VERIFIKASI					KETRANGAN
		Uraian Usulan	Target	Satuan	Lokasi	Target	Satuan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	
44	Kabupaten Sumenep	Banyak produk IKM mamin yang belum terfasilitasi pengurusan Nutrition Facts (20 produk)			Kec. Kota, Kab. Sumenep						Dapat difasilitasi melalui proses seleksi dokumen dan menyesuaikan ketersediaan anggaran
45	Kabupaten Trenggalek	Kurangnya akses pemasaran			Kabupaten Trenggalek / Luar Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek			PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Dapat difasilitasi melalui kepesertaan dengan proses seleksi dan menyesuaikan ketersediaan anggaran.
46	Kabupaten Trenggalek	Potensi pemberdayaan pembatik wanita tinggi namun masih diperlukan bimbingan teknis untuk peningkatan keterampilan untuk menghasilkan produk yang berdaya saing. Pelatihan Ketrampilan Batik Tulis dan Batik Pewarnaan Alam			Desa Prambon Kec. Tugu, Kab. Trenggalek						Dapat difasilitasi kepesertaan pelatihan dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
47	Kabupaten Tuban	Belum optimalnya produktifitas kelompok karena kurangnya keterampilan dan keterbatasan peralatan			Kelurahan Gedongombo Kecamatan Semanding, Kab. Tuban						Dapat difasilitasi melalui kepesertaan pelatihan minuman herbal
48	Kabupaten Tuban	Masih kurangnya jaringan pemasaran hasil Produk UMKM			Kab/Kota di Prov Jatim (menyesuaikan Lokasi Pameran Regional), Kab. Tuban			PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Dapat difasilitasi kepesertaan melalui proses seleksi dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
49	Kabupaten Tulungagung	Promosi Produk						PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Dapat difasilitasi kepesertaan melalui proses seleksi dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
50	Kabupaten Tulungagung	Fasilitasi SNI bagi IKM logam, 50 IKM						PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dapat difasilitasi melalui kepesertaan peningkatan daya saing IKM Logam dan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

NO	KAB/KOTA	USULAN KAB KOTA				HASIL VERIFIKASI					KETRANGAN
		Uraian Usulan	Target	Satuan	Lokasi	Target	Satuan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	
51	Kota Kediri	kerjasama antar daerah untuk pemasaran produk unggulan masing-masing daerah dan perlunya meningkatkan belanja produk dalam negeri terutama produk UMKM			UMKM Kota Kediri, Kota Kediri						Dapat difasilitasi kepesertaan melalui proses seleksi dan menyesuaikan ketersediaan anggaran
52	Kota Kediri	Sosialisasi Konsumen Cerdas dalam rangka perlindungan Konsumen karena sebelumnya belum ada			Kota Kediri, Kota Kediri						Dapat difasilitasi kepesertaan sosialisasi dan menyesuaikan ketersediaan anggaran
53	Kota Madiun	Sosialisasi Konsumen Cerdas dalam rangka perlindungan Konsumen			Dinas Perdagangan Kota Madiun, Kota Madiun						Dapat difasilitasi kepesertaan dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
54	Kota Probolinggo	IKM belum memiliki sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing produk An. Dwi Surya			Jl. Serma Abd. Rahman Gg. Kusuma Bakti RT 02 RW 06 Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan, Kota Probolinggo			PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Diakomodir
55	Kota Probolinggo	IKM belum memiliki Sertifikasi Halal untuk meningkatkan daya saing produk an. IKM UD Hans (Amiruddin)			Jl. Bengawan Solo No. 35 RT 02 RW 01 Kel. Kademangan Kec. Kademangan, Kota Probolinggo			PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Diakomodir
56	Kota Probolinggo	IKM belum memiliki Sertifikasi Halal untuk meningkatkan daya saing produk an IKM Avixel (A.T. Octavianto)			Jl. Kinibalu I No. 42 Kel. Ketapang Kec. Kademangan, Kota Probolinggo			PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Diakomodir
57	Kota Probolinggo	IKM belum memiliki Sertifikasi Halal untuk meningkatkan daya saing produk an. IKM Posyantek Jaya (Zainal Abidin)			Jl. Sunan Bonang RT 03 RW 02 Kel. Jrebeng Wetan Kec. Kedopok, Kota Probolinggo			PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Diakomodir

NO	KAB/KOTA	USULAN KAB KOTA				HASIL VERIFIKASI					KETRANGAN
		Uraian Usulan	Target	Satuan	Lokasi	Target	Satuan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	
58	Kota Probolinggo	IKM belum memiliki Sertifikasi Halal untuk meningkatkan daya saing produk an. IKM UD. Rejeki Lancar (Moh. Mansyur)			Perum Semeru Indah A No. 15 RT 05 RW 05 Kel. Triwung Kidul Kec. Kademangan, Kota Probolinggo			PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Diakomodir

Tabel 2.5.2

Usulan Kabupaten Kota hasil pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun 2022 yang di Tidak Akomodir

NO	KABKOTA	USULAN KAB KOTA				ALASAN TIDAK DI AKOMODIR
		Uraian Usulan	Target	Satuan	Lokasi	
1	Kabupaten Banyuwangi	Bantuan Pelatihan dan Peralatan IKM Kopi dan Kakao untuk Mendukung Perekonomian Banyuwangi daerah Selatan			Kecamatan Glenmore dan Kecamatan Kalibaru, Kab. Banyuwangi	Usulan tidak sesuai dengan rincian.
2	Kabupaten Banyuwangi	Bantuan Pelatihan dan Peralatan IKM Pengolahan Minuman untuk Mendukung Perekonomian Banyuwangi daerah Utara			Kecamatan Wongsorejo, Kab. Banyuwangi	Usulan tidak sesuai dengan rincian.
3	Kabupaten Banyuwangi	Bantuan Pelatihan dan Peralatan IKM Pengolahan Makanan untuk Mendukung Perekonomian Banyuwangi daerah Selatan untuk sentra Buah Naga			Kecamatan Muncar, Kecamatan Bangorejo, Kecamatan Siliragung dan Kecamatan Pesanggaran, Kab. Banyuwangi	Usulan tidak sesuai dengan rincian.
4	Kabupaten Jombang	Kurang terfasilitasinya pemasaran produk kualitas ekspor (kopi)			Kab. Jombang, Kab. Jombang	Usulan double entry
5	Kabupaten Kediri	Pembangunan Pasar Buah Regional Banyak (Kawasan Bandara)			Kec. Bayakan Kab. Kediri, Kab. Kediri	Agar disesuaikan ke Belanja Bantuan Keuangan

NO	KABKOTA	USULAN KAB KOTA				ALASAN TIDAK DI AKOMODIR
		Uraian Usulan	Target	Satuan	Lokasi	
6	Kabupaten Kediri	Pembangunan Pasar Hewan Grogol (Kawasan Bandara)			Kec. Grogol Kab. Kediri, Kab. Kediri	Agar disesuaikan ke Belanja Bantuan Keuangan
7	Kabupaten Kediri	Pembangunan Pasar Buah Regional Ngancar (Komoditas Nanas)			Kec. Ngancar Kab. Kediri, Kab. Kediri	Agar disesuaikan ke Belanja Bantuan Keuangan
8	Kabupaten Kediri	Pemberdayaan industri pakan (unggas, ikan, dan ruminansia) untuk menurunkan harga pakan yang terus naik untuk mengurangi biaya produksi			Kec. Kras, Kab. Kediri	Usulan bukan prioritas Provinsi
9	Kabupaten Malang	Kurasi produk nggulan IKM Hingga Siap Ekspor lebih ke prioritas kurasi produk			Kab. Malang, Kab. Malang	Usulan tidak spesifik.
10	Kabupaten Ngawi	Pelatihan IKM			Kabupaten Ngawi, Kab. Ngawi	Usulan tidak sesuai Prioritas Provinsi
11	Kabupaten Ngawi	Pelatihan Pengembangan ekspor berbasis online			Kabupaten Ngawi, Kab. Ngawi	Usulan yang diminta adalah SVLK, tidak sesuai dengan kewenangan Disperindag.
12	Kabupaten Pasuruan	Kurangnya Kemitraan dengan Gapoktan (sosialisasi)			Kabupaten Pasuruan, Kab. Pasuruan	Usulan tidak spesifik
13	Kabupaten Trenggalek	Masih ditemukannya produk IKM yg kemasannya belum sesuai dengan PP 69 tahun 1999 tentang label dan iklan , maka fasilitasi cetak kemasan untuk 20 IKM yg sesuai dengan standar masih dibutuhkan			Kec. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Kategori usulan tidak sesuai dengan permasalahan.
14	Kabupaten Trenggalek	Keterbatasan pengetahuan IKM konten marketing dan promosi produk yang menarik untuk meningkatkan dan memperluas penjualan produk. Bimbingan Teknis Pembuatan Konten Promosi Melalui Media Sosial Untuk 25 Industri Kecil Menengah			Kec. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Kategori usulan tidak sesuai dengan permasalahan.
15	Kota Kediri	terbatasnya anggaran pemda untuk mempromosikan produk unggulan berpotensi ekspor melalui pameran internasional			Jakarta, Kota Kediri	Usulan double

NO	KABKOTA	USULAN KAB KOTA				ALASAN TIDAK DI AKOMODIR
		Uraian Usulan	Target	Satuan	Lokasi	
16	Kota Kediri	kurangnya kerjasama antar daerah untuk pemasaran produk unggulan masing-masing daerah dan perlunya meningkatkan belanja produk dalam negeri terutama produk UMKM			Kab/Kota di Indonesia, Kota Kediri	Usulan double
17	Kota Madiun	Pengajuan Pelatihan Strategi dan Pemasaran Online melalui Marketplace, 1 Kali Kegiatan nilai			Dinas Perdagangan Kota Madiun, Kota Madiun	Bukan prioritas disperindag
18	Kota Madiun	Pengajuan Fasilitasi Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri, senilai			Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kota Madiun	Bukan Prioritas Disperindag Provinsi Jawa Timur
19	Kota Malang	Adanya keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Malang untuk melengkapi sarana dan prasarana pada Malang Creative Center (MCC), sehingga dibutuhkan tambahan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur			Jl. A. Yani, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing (eks kantor PDAM Kota Malang yang lama), Kota Malang	Kategori usulan tidak sesuai, dialihkan ke Belanja Bantuan Keuangan.
20	Kota Malang	Pasar Buku Wilis merupakan salah satu tujuan masyarakat dalam mencari buku dengan harga terjangkau. Rehabilitasi sangat diperlukan.			Jl. Simpang Wilis Indah, Gadingkasri, Kota Malang	Kategori usulan tidak sesuai, dialihkan ke Belanja Bantuan Keuangan.

Tabel 2.5.3

Dukungan Perangkat Daerah dalam pokok-pokok pikiran Dewan

NO	POKOK PIKIRAN DEWAN	URAIAN DUKUNGAN	LOKASI	BESARAN/SATUAN	PROGAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN

BAB 3

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana yang telah ditetapkan persiden Visi Indonesia yakni “**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong**”. Yang selanjutnya diterjemahkan kedalam 9 misi sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, prioritas pembangunan nasional dan pembangunan bidang yang terkait dengan perindustrian dan perdagangan adalah “Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan”

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementrian Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023 memiliki beberapa fokus strategi Sektor perdagangan pada tahun 2023, antara lain :

1. Akses Pangan
2. Kemitraan dan Kewirausahaan
3. Peningkatan Ekspor
4. Pilar Pertumbuhan dan daya saing ekonomi

Dalam Sektor Perindustrian, Strategi dalam membangun industri antara lain :

1. Membangun industri kimia dasar dan logam dasar
2. Membangun Insfrastruktur dan kawasan industri
3. Pengembangan kawasan industri yang terintegrasi yang dilengkapi instalasi pengolahan limbah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 2023

Tujuan dan sasaran Renja tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur mengacu pada Renstra Perubahan 2019-2024, yaitu:

1. Meningkatnya Nilai Tambah Produksi, dengan indikator “Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan”
2. Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan, dengan indikator “Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi”

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Meningkatnya Nilai Tambah Produksi	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (%)	5,93	Meningkatnya PDRB sektor industri pengolahan	Nilai PDRB industri pengolahan (Triliun Rp)	750
Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi (%)	4,69	Meningkatnya PDRB sektor Perdagangan	Nilai PDRB PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi (Rp. Triliun)	352,72
			Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase peningkatan barang yang diawasi dan sertifikasi barang beredar (%)	1
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	86,8

Tahun 2023

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 terdiri dari program-program yang menunjang visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Program ini mencakup urusan perindustrian dan urusan perdagangan serta program-program penunjang adalah sebagai mana berikut :

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jatim (Tabel T-C.33)

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)		Prakiraan Maju (Rencana Tahun 2024)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3	30	2			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Ijin yang diterbitkan	Dokumen	135.062	180.244.000	135.062	457.116.000
3	30	2	101		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	Jumlah Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	Dokumen	1	18.350.000	1	18.150.000
3	30	2	101	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	2	18.350.000	2	18.150.000
3	30	2	102		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	1	35.964.000	1	38.966.000
3	30	2	102	3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	Dokumen	5	35.964.000	5	38.966.000
3	30	2	104		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah SKA dan API yang diterbitkan	Dokumen	135.060	125.930.000	135.060	400.000.000
3	30	2	104	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	135.000	82.186.000	135.000	200.000.000
3	30	2	104	2	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan API melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Angka Pengenal Importir yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dokumen	3	43.744.000	3	200.000.000
3	30	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pertumbuhan Sarana Distribusi Perdagangan	Persen	1	406.200.600	1	263.218.000
3	30	3	101		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	sarana perdagangan	4	406.200.600	4	263.218.000
3	30	3	101	2	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Laporan	4	272.616.600	4	75.410.000
3	30	3	101	3	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	Orang	2	133.584.000	2	187.808.000
3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tingkat Inflasi Bahan Makanan	Persen	2	1.060.886.000	2	1.587.621.600
3	30	4	101		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Prosentase Ketersediaan Bahan Pokok	Persen	90	14.040.000	90	9.060.000
3	30	4	101	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Laporan	1	14.040.000	1	9.060.000
3	30	4	102		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas	Jumlah Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi	Informasi	1	1.031.980.000	1	1.543.191.600

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)		Prakiraan Maju (Rencana Tahun 2024)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan					
3	30	4	102	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Laporan	12	923.660.000	12	1.062.860.000
3	30	4	102	2	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	11	108.320.000	11	480.331.600
3	30	4	103		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Kali	37	14.866.000	37	35.370.000
3	30	4	103	1	Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi	Jumlah Laporan Pemeriksaan Kegiatan Distribusi	Laporan	1	3.960.000	1	9.240.000
3	30	4	103	2	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	Laporan	1	3.960.000	1	9.240.000
3	30	4	103	3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	1	3.946.000	1	9.240.000
3	30	4	103	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Laporan	1	3.000.000	1	7.650.000
3	30	5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Net Ekspor Non Migas	Milyar US\$	1	274.070.000	1	200.000.000
3	30	5	101		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang di fasilitasi Pembinaan, Promosi dan Misi Dagang Produk Ekspor	Pelaku Usaha	98	274.070.000	98	200.000.000
3	30	5	101	1	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	2	63.450.000	2	106.801.000
3	30	5	101	3	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	80	134.620.000	80	28.705.000
3	30	5	101	4	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	Produk	120	38.000.000	120	32.205.000
3	30	5	101	5	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Pelaku Usaha	120	38.000.000	120	32.289.000
3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan perundang-undangan	Persen	80	1.929.719.725	80	2.451.258.974
3	30	6	101		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Konsumen	Kali	80	914.898.585	80	1.033.155.477
3	30	6	101	1	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	BPSK	5	466.516.675	5	537.272.539
3	30	6	101	2	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	LPKSM	30	157.237.430	30	175.562.938
3	30	6	101	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	Pengaduan	181	291.144.480	181	320.320.000
3	30	6	102		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	Sertifikat	6.000	728.892.640	6.000	1.101.379.899
3	30	6	102	1	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	Komoditi	17	483.483.440	17	715.185.469
3	30	6	102	2	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	Dokumen	4.500	84.143.200	4.500	231.777.430
3	30	6	102	3	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	Sertifikat	12	161.266.000	12	154.417.000

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)		Prakiraan Maju (Rencana Tahun 2024)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3	30	6	103		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah barang/jasa yang diawasi	Barang/Jasa	612.000	285.928.500	612.000	316.723.598
3	30	6	103	1	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	Laporan	96	208.008.000	96	235.573.598
3	30	6	103	2	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Kasus yang Ditangani	Kasus	101	77.920.500	141	81.150.000
3	30	7			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Pelaku usaha yang difasilitasi penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaku Usaha	90	7.655.520.400	90	12.092.044.400
3	30	7	101		Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah pelaksanaan promosi perdagangan antar provinsi	Kali	7	7.639.416.400	7	12.053.184.400
3	30	7	101	1	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kebersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	UMKM	200	7.639.416.400	257	12.053.184.400
3	30	7	103		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kali	2	16.104.000	2	38.860.000
3	30	7	103	2	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Laporan	1	11.664.000	1	4.660.000
3	30	7	103	3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Dokumen	1	4.440.000	1	34.200.000
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase peningkatan unit usaha industri	Persen	1	10.451.906.722	1	11.166.561.222
3	31	2	101		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan Industri	Dokumen	2	10.451.906.722	2	11.166.561.222
3	31	2	101	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	25.000.000	1	225.000.000
3	31	2	101	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	2	50.000.000	2	50.000.000
3	31	2	101	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	128	5.776.906.722	138	9.691.561.222
3	31	2	101	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	2	4.050.000.000	2	100.000.000
3	31	2	101	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	10	500.000.000	20	1.000.000.000
3	31	2	101	6	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	4	50.000.000	4	100.000.000
3	31	3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Prosentase peningkatan pengendalian izin usaha industri	Persen	10	35.000.000	10	40.000.000
3	31	3	101		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Unit Usaha	24	35.000.000	24	40.000.000
3	31	3	101	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPIU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi: 1) Industri Besar; dan 2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota,	Dokumen	2	10.000.000	2	20.000.000

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)		Prakiraan Maju (Rencana Tahun 2024)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi					
3	31	3	101	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	Dokumen	2	25.000.000	2	20.000.000
3	31	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Industri yang telah terdaftar dalam SIINas	Persen	20	90.000.000	20	85.000.000
3	31	4	101		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Informasi	2	90.000.000	2	85.000.000
3	31	4	101	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1	10.000.000	1	20.000.000
3	31	4	101	2	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Dokumen	1	65.000.000	1	50.000.000
3	31	4	101	3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen	1	15.000.000	1	15.000.000
3	31	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	Persen	90	95.400.195.553	90	111.172.840.804
						Persentase realisasi anggaran	Persen	88.5		88,50	
						Indeks profesionalitas ASN	Persen	93		93	
3	31	1	01.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	20	410.000.000	20	650.000.000
3	31	1	01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	200.000.000	5	300.000.000
3	31	1	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	2.000.000	1	2.500.000
3	31	1	01.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	2.000.000	1	2.500.000
3	31	1	01.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	2.000.000	1	2.500.000
3	31	1	01.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	2.000.000	1	2.500.000
3	31	1	01.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	2.000.000	1	40.000.000
3	31	1	01.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	200.000.000	4	300.000.000
3	31	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	12	67.045.963.000	12	76.097.162.000

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)		Prakiraan Maju (Rencana Tahun 2024)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3	31	1	01.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	250	65.418.646.000	250	74.435.436.000
3	31	1	01.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	1.567.116.000	12	1.522.726.000
3	31	1	01.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	25.000.000	12	100.000.000
3	31	1	01.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	19.591.600	12	20.000.000
3	31	1	01.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	12	9.000.000	12	10.000.000
3	31	1	01.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	12	1.039.400	12	2.000.000
3	31	1	01.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	4.200.000	12	5.000.000
3	31	1	01.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1.370.000	1	2.000.000
3	31	1	01.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	20	71.000.000	20	111.000.000
3	31	1	01.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1.000.000	1	1.000.000
3	31	1	01.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	20.000.000	1	50.000.000
3	31	1	01.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	10.000.000	1	10.000.000
3	31	1	01.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	10.000.000	1	10.000.000
3	31	1	01.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	10.000.000	2	20.000.000
3	31	1	01.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	10.000.000	1	10.000.000
3	31	1	01.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000
3	31	1	01.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Laporan	12	254.000.000	12	430.000.000
3	31	1	01.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	74.000.000	1	50.000.000
3	31	1	01.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	-	-		
3	31	1	01.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000
3	31	1	01.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000
3	31	1	01.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	50.000.000	1	100.000.000
3	31	1	01.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	50.000.000	4	200.000.000
3	31	1	01.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	20.000.000	10	20.000.000
3	31	1	01.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Orang	10	20.000.000	10	20.000.000
3	31	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	11	2.250.918.440	11	2.755.007.506

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)		Prakiraan Maju (Rencana Tahun 2024)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3	31	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	17	58.071.242	17	80.564.121
3	31	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	37	299.788.640	38	336.388.959
3	31	1	01.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	20	135.673.825	21	130.724.694
3	31	1	01.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	46	482.822.465	46	560.072.517
3	31	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	23	164.125.569	23	167.892.061
3	31	1	01.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	581	51.560.000	593	82.540.000
3	31	1	01.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	3	56.650.000	4	125.700.000
3	31	1	01.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	237	87.806.000	237	105.058.568
3	31	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	181	879.420.700	181	1.131.066.586
3	31	1	01.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000
3	31	1	01.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	25.000.000	1	25.000.000
3	31	1	01.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	3	135.760.000	3	426.470.000
3	31	1	01.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	-	-	-	-
3	31	1	01.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	-	-	-
3	31	1	01.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	28.000.000	3	118.000.000
3	31	1	01.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	13	92.760.000	20	293.470.000
3	31	1	01.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	-	15.000.000	-	15.000.000
3	31	1	01.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-
3	31	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	23.758.490.135	1	27.810.704.707
3	31	1	01.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	58	25.317.000	58	36.637.164
3	31	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	169	3.734.788.115	169	4.040.166.046
3	31	1	01.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	5.000.000	2	30.000.000
3	31	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	141	19.993.385.020	141	23.703.901.497
3	31	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara		1	1.474.063.978	1	2.892.496.591
3	31	1	01.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	25	145.693.187	25	169.041.337
3	31	1	01.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	61	535.053.256	61	651.373.054

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)		Prakiraan Maju (Rencana Tahun 2024)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3	31	1	01.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	10.000.000	1	20.000.000
3	31	1	01.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	170	225.494.785	170	258.583.200
3	31	1	01.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	25.000.000	1	20.000.000
3	31	1	01.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	27.840.000	1	44.000.000
3	31	1	01.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	304.982.750	14	1.229.499.000
3	31	1	01.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	200.000.000	3	500.000.000
									117.483.743.000		139.515.661.000

BAB 4**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 berisi capaian kinerja yang bertujuan mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Perubahan Provinsi Jawa Timur 2019-2024 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur memiliki tugas untuk mewujudkan Misi ke-1 Gubernur Jawa Timur : *“Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor maupun antar Wilayah”*. Misi pertama ini memuat tujuan *“Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang didukung Konektivitas Antar Wilayah”*, yang diukur dengan indikator *“Pertumbuhan ekonomi dan Indeks Gini”*. Sasaran dari indikator tujuan ini adalah :

1. Meningkatkan Nilai Tambah Produksi, dengan indikator target *“Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (%)”*
2. Meningkatkan Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan, dengan indikator target *“Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi (%)”*

Sejalan dengan misi, tujuan dan sasaran RPJMD 2019-2024 diatas, maka rencana kerja yang ingin dicapai Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Timur dengan mendukung program kegiatan perangkat daerah dalam pelaksanaan program ICON Gubernur serta penjelasan mengenai tentang prioritas perangkat daerah provinsi tahun adalah sebagaimana diuraikan dalam berikut :

Tabel 4.1

Program Kegiatan Yang Mendukung Program Prioritas Provinsi Dan Program Icon Gubernur Tahun 2023

PRIORITAS PROVINSI	NAWABHAKTI	PROGRAM ICON	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
PP 1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	Bhakti – 2 : Jatim Kerja. "Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun keunggulan Ekonomi"	Millennial Job Center	Peningkatan daya saing KUKM melalui dukungan MJC	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	PAD	400.000.000	
		Perdagangan Antar Pulau	Fasilitasi Promosi, Penguatan KPD dan Misi Dagang	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	PAD	10.000.000.000	
		TOTAL						10.400.000.000	

Tabel 4.2

Program Prioritas Perangkat Daerah tahun 2023

NO	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET/SATUAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN
1	Pengembangan Industri	Jumlah pelaku industri yang mendapatkan fasilitas pengembangan industri	500 Pelaku Industri	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Prosentase peningkatan unit usaha industri	8.465.000.000	PAD
				Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan Industri	8.465.000.000	PAD
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	7.465.000.000	PAD
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.000.000.000	PAD
2	Peningkatan Standardisasi dan Desain Produk Industri	Jumlah pelaku industri yang mendapatkan fasilitas dan desiminasi standarisasi dan desain produk industri	500 Pelaku Industri	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Prosentase peningkatan unit usaha industri	404.907.500	PAD
				Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan Industri	404.907.500	PAD
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	404.907.500	PAD
3	Peningkatan Teknologi IKM	Jumlah Jasa	5000 jasa	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Prosentase peningkatan unit usaha industri	1.421.653.722	PAD
				Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan Industri	1.421.653.722	PAD
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1.421.653.722	PAD
4	Stabilisasi Harga Dan Ketersediaan Bahan Pokok	Inflasi Bahan Makanan	2,40%	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Tingkat Inflasi Bahan Makanan	1.543.191.600	PAD
				Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1.543.191.600	PAD
				Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	1.062.860.000	PAD
				Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	480.331.600	PAD

NO	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET/SATUAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN
5	Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	90%	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan perundang-undangan	2.451.258.974	PAD
		Jumlah sertifikasi mutu barang	4500 sertifikasi	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Konsumen	1.033.155.477	PAD
				Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	537.272.539	PAD
				Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	175.562.938	PAD
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	320.320.000	PAD
				Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	1.101.379.899	PAD
				Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	715.185.469	PAD
				Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	231.777.430	PAD
				Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	154.417.000	PAD
				Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah barang/jasa yang diawasi	316.723.598	
		Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	235.573.598	PAD		
		Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Kasus yang Ditangani	81.150.000	PAD		

Beberapa sasaran yang akan menjadi prioritas pada tahun 2023 antara lain adalah:

a. Pengembangan Industri

Pengembangan industri secara paripurna menunjukkan bahwa strategi pembinaan terhadap IKM dimulai dari penyiapan bahan baku, proses pengolahan, sertifikasi produk, hingga pemasaran. Pembinaan ini dilakukan terhadap IKM berorientasi lokal, domestik, dan ekspor.

Agar efektif dan efisien, pembinaan harus diawali dengan pengklasifikasian IKM. Pengklasifikasian yang tepat akan menentukan pola pembinaan yang sesuai untuk masing-masing IKM. Pengklasifikasian dapat didasarkan pada beberapa kriteria berikut:

KRITERIA	A	B	C
Omset per tahun (Rp)	< 300 jt	300 jt - 2,5 M	2,5 M - 50 M
Tren Omset (3 th terakhir)	< 12 % per th	≥ 12 % per th	≥ 12 % per th
Jumlah pegawai	1-5 org	5-19 org	> 20 org
Jangkauan Pemasaran	Lokal	Luar Prov	Luar Negeri
Standardisasi	-	GMP, ISO	GMP, ISO, SNI
Legalitas	-	TDI	IUI
Bahan Baku	Lokal & Impor	Lokal & Impor	Lokal

Pembinaan dapat difokuskan pada IKM kelompok B dan C karena pembinaan kelompok ini diharapkan mampu menghasilkan efek ungkit bagi perkembangan kelompok IKM A.

Selain berdasarkan klasifikasi IKM, pembinaan juga harus didasarkan pada informasi pasar baik di dalam maupun luar negeri. Informasi pasar dalam negeri disediakan oleh Bidang Perdagangan Dalam Negeri dengan memanfaatkan data yang disediakan oleh Kantor Perwakilan Dagang, sementara informasi pasar luar negeri disediakan oleh Bidang Perdagangan Internasional berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) di beberapa negara mitra. Data informasi pasar dapat meliputi jenis, volume, spesifikasi, dan standarisasi komoditi yang dibutuhkan oleh masing-masing daerah/negara.

b. Standarisasi Produk IKM

Standarisasi merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh sebuah produk agar mampu berdaya saing di pasar nasional maupun global. Sebagai keberlanjutan Fasilitas standarisasi yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, menjadi prioritas pada tahun 2023, seperti SNI, KI, ISO, desain produk, barcode, batik mark, halal dan lain-lain.

c. Peningkatan Teknologi IKM

Pelayanan dan pengembangan industri komoditi di Jawa Timur melalui 5 UPT komoditi yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur antara lain logam, kulit, kayu, makanan minuman, dan aneka kerajinan. Melalui 5 Unit Pelayanan Teknis tersebut diharapkan industri di lingkungan tersebut dapat lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas

d. Stabilisasi dan Ketersediaan

Beberapa prioritas dalam penyediaan informasi harga pokok adalah optimalisasi Sistem Informasi Ketersediaan dan Harga Bahan Pokok (Siskaperbappo) dan penyediaan layar monitor informasi harga. Optimalisasi siskaperbappo pada tahun 2020 antara lain meliputi penyediaan informasi harga dari sentra-sentra produksi bahan pokok di Jawa Timur agar dapat dilakukan pemantauan disparitas harga di tingkat produsen dan konsumen akhir serta penyediaan layar monitor harga di beberapa pasar. Pada tahun 2019, optimalisasi ini perlu ditingkatkan dengan menambah jangkauan dan jenis informasi yang disediakan

e. Pengembangan Ekspor Dan Promosi Dalam Dan Luar Negeri

Selain melalui KPD, pengiriman misi dagang merupakan strategi penguatan perdagangan antarpulau yang harus terus dilakukan. Pada tahun 2010, pengiriman misi dagang perlu ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Dari segi kualitas, kegiatan misi dagang harus didahului dengan proses seleksi peserta berdasarkan keunggulan produk dan potensi pasar daerah yang dituju. Selain itu perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tindaklanjut transaksi yang dilakukan saat pelaksanaan misi dagang. Dari segi kuantitas, jumlah kegiatan dan peserta misi dagang perlu ditingkatkan, terutama untuk provinsi-provinsi mitra yang dapat menjadi hub (penghubung) perdagangan dengan negara lain Selain promosi perdagangan luar negeri, pengembangan fasilitas perdagangan luar negeri juga perlu dilakukan.

f. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Pembinaan produsen dan konsumen dalam rangka tertib tata niaga serta sertifikasi mutu barang yang dilaksanakan oleh dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur meliputi 5 Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen di 5 Area antara Lain, Surabaya, Bojonegoro, Kediri, Malang, dan Jember serta dengan adanya

2 Unit Pelaksana Teknis Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau di Surabaya dan Jember.

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 disusun berdasarkan Rancangan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 dan merupakan tahapan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023. Sebagai sebuah rencana, dokumen ini memuat rencana program dan kegiatan yang masih bersifat indikatif. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk dilakukan berbagai perubahan dan perbaikan terhadap rencana tersebut.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dalam penyusunan Renja ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur mempertimbangkan berbagai permasalahan dan isu-isu strategis terkait bidang perindustrian dan perdagangan, baik di tingkat internasional, regional, nasional maupun Provinsi Jawa Timur. Selain itu Renja ini sedapat mungkin mengupayakan sinkronisasi dengan kebijakan-kebijakan nasional yang diambil oleh Kementerian Perindustrian maupun Kementerian Perdagangan. Masukan dari berbagai pemangku kepentingan (asosiasi, perbankan, kabupaten/kota, dan lain-lain) dalam berbagai forum yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur juga menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja ini.

Surabaya, Juli 2022

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. Ir. DRAJAT IRAWAN, SE., M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19621115 198903 1 013